

**Analisis Tingkat Kekumuhan Pada Kawasan  
Permukiman Kumuh Di Kelurahan Sukaramai  
Kecamatan Pekanbaru Kota**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota  
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau*



**Di Susun**

**Oleh :**

MUTIA AFRIANTI

153410334

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FEKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

**KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhana wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan target penulis. Tugas akhir ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) pada fakultas teknik perencanaan wilayah dan kota di Universitas Islam Riau (UIR). Adapun judul tugas akhir ini adalah “ Strategi Penanganan Utilitas dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kecamatan Pekanbaru Kota”.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis telah banyak memperoleh berbagai dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Keluarga tercinta khususnya kedua orang tua penulis Hafnedi (papa) dan Nurhidayati (mama),serta abang ku eko afriandi, dan kedua kakak ku Rezi Afrianti dan Dina Ayatri yang selalu memberikan do'a, perhatian, bantuan, semangat, motivasi dan dukungan.
2. Bapak Ir.H. Abd. Kudus Zaini, MT. MS. Tr selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Puji Astuti, ST, MT selaku pembimbing dan sekaligus Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah banyak

memberikan kritik, saran, koreksi dan arahan dalam membimbing dan membantu penulisan tugas akhir ini.

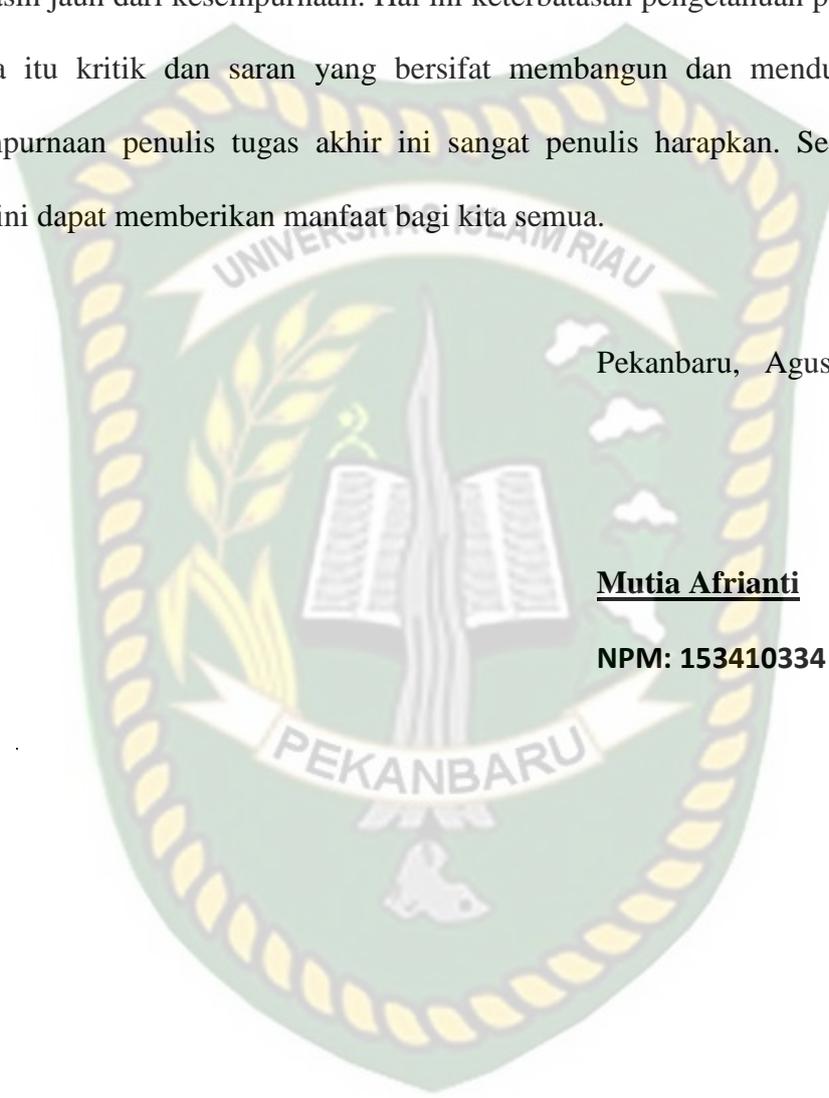
4. Bapak Muhammad Sofwan, ST, MT selaku Sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Fakultas Teknik yang telah banyak membantu penulis.
7. Teman-teman dan rekan seperjuangan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2015 atas motivasi dan kebersamaannya.
8. Sahabat-sahabat yaitu Wirda Sari Nasution, Willy Monica Bakti, Shinta Dwi Oktaviani dan teman-teman planbee yang telah memberikan dukungan, do'a, semangat dan motivasi dalam membantu penulis selama ini.

Semoga Allah Subhana wa Ta'ala membalas semua amal dan kebaikan kepada semua pihak yang terkait dalam membantu peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan penulis tugas akhir ini sangat penulis harapkan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Agustus 2020

**Mutia Afrianti**

**NPM: 153410334**



**Analisis Tingkat Kekumuhan Pada Kawasan Permukiman Kumuh Di  
Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota**

(mutiaafrianti09@gmail.com)

**MUTIA AFRIANTI**

**153410334**

**ABSTRAK**

Kelurahan Sukaramai berada di pinggiran pusat Kota Pekanbaru yang dilewati oleh Sungai Sago. Kawasan yang dilewati sungai menempati batas lahan yang semestinya tidak diizinkan didirikan bangunan. Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Sukaramai merupakan satu dari Sembilan kecamatan di Kota Pekanbaru yang ditetapkan dalam kawasan permukiman kumuh dengan luas 6,60 Ha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kekumuhan yang diidentifikasi dari karakteristik sosial ekonomi penduduk, kondisi prasarana dan kondisi fisik bangunan hunian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pembobotan atau skoring berdasarkan variable dan indikator yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.2 Tahun 2016. Permukiman kumuh di Kelurahan Sukaramai di kategorikan dalam kawasan permukiman kumuh ringan, kondisi prasarana masih banyak yang belum memenuhi persyaratan teknis dan kondisi bangunan fisik hunian yaitu permanen, non permanen dan semi permanen.

**Kata Kunci:** *Permukiman Kumuh, Kawasann Sukaramai, Tingkat Kekumuhan*

**Analysis of Slum Levels in Slum Areas in Sukaramai Village, Pekanbaru City  
District  
(mutiaafrianti09@gmail.com)**

**MUTIA AFRIANTI**

**153410334**

**ABSTRACT**

Sukaramai Village is on the outskirts of the central city of Pekanbaru which is crossed by the Sago River. Areas that are crossed by rivers occupy land boundaries that buildings should not be allowed to erect. Based on the Pekanbaru Mayor Decree Number 878 of 2017 concerning Amendments to the Decision of the Mayor of Pekanbaru Number 151 of 2016 concerning Determination of Housing Location and Slum Settlements Sukaramai Sub-district is one of the nine sub-districts in Pekanbaru City which are designated in slum areas with an area of 6.60 Ha. This study aims to analyze the level of slums identified from the socio-economic characteristics of the population, the condition of infrastructure and the physical condition of residential buildings. The approach used in this study is a qualitative approach with a weighting or scoring method based on variables and indicators established by Minister of Public Works Regulation No.2 Year 2016. Slum settlements in Sukaramai Village are categorized in light slum areas, there are still many infrastructure conditions. have not met the technical requirements and physical building conditions, namely permanent, non-permanent and semi-permanent.

**Keywords:** *Slums, Sukaramai Zone, Slum Level*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Sasaran Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
1.6 Ruang Lingkup Wilayah .....	6
1.7 Kerangka Pemikiran.....	10
1.8 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Karakteristik Sosial Ekonomi Penduduk .....	15
2.1.1 Karakteristik Sosial.....	16
2.1.1.1 Tingkat Pendidikan .....	16

2.1.1.2	Kondisi Rumah.....	17
2.1.2	Karekteristik Ekonomi.....	18
2.1.2.1	Jenis Pekerjaan.....	18
2.1.2.2	Pendapatan.....	19
2.2	Pengertian Permukiman.....	20
2.2.1	Permukiman Padat Di Kawasan Perkotaan.....	22
2.2.2	Faktor Penyebab Pertumbuhan Kawasan Permukiman.....	24
2.2.3	Pengertian Permukiman Kumuh.....	24
2.2.4	Karakteristik Permukiman Kumuh.....	29
2.3	Pengertian Infrastruktur.....	32
2.4	Pengertian Utilitas.....	34
2.4.1	Pengertian Prasarana dan Sarana.....	35
2.4.2	Prasarana Jaringan Jalan.....	36
2.4.2.1	Kriteria Penetapan Klasifikasi Fungsi Jalan.....	38
2.4.3	Prasarana Jaringan Drainase.....	47
2.4.4	Prasarana Jaringan Air Minum.....	47
2.4.5	Prasarana Jaringan Air Limbah.....	48
2.4.6	Prasarana Jaringan Persampahan.....	49
2.5	Kondisi Dan Tingkat Kekumuhan.....	50
2.5.1	Kriteria Kawasan Kumuh.....	51
2.5.2	Identifikasi Legalitas Tanah.....	57
2.6	Penelitian Terdahulu.....	58

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	62
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	63
3.3 Jenis Data dan Sumber Data .....	63
3.3.1 Jenis Data .....	63
3.3.2 Sumber Data .....	64
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	65
3.5 Bahan dan Alat Penelitian.....	66
3.6 Teknik Populasi dan Sampel.....	66
3.6.1 Populasi .....	66
3.6.2 Teknik Sampling .....	67
3.6.3 Teknik Analisis .....	67
3.7 Tahap PembuatanLaporan Penelitian.....	68
3.7.1 Tahap Pembuatan Rancangan Penelitian .....	68
3.7.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian .....	69
3.7.3 Tahap Kompilasi Data .....	70
3.7.4 Tahap Analisis Data .....	70
3.8 Variabel Penelitian .....	78
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....</b>	<b>81</b>
4.1 Kondisi Umum Kota Pekanbaru .....	81
4.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru .....	81
4.1.2 Kondisi Fisik Dasar .....	82
4.1.2.1 Topografi.....	82

4.1.2.2 Klimatologi .....	83
4.1.3 Kependudukan .....	83
4.1.4 Perekonomian .....	84
4.1.5 Keseuaian Lahan .....	87
4.2 Kondisi Umum Kecamatan Pekanbaru Kota .....	88
4.2.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota .....	88
4.2.2 Kependudukan.....	88
4.2.2.1 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan .....	89
4.2.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	89
4.3 Letak Geografis dan Luas Wilayah Kelurahan Sukaramai .....	90
4.3.1 Kondisi Demografi.....	90
4.3.2 Kependudukan.....	91
4.3.2.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk .....	91
4.3.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan.....	92
4.3.2.3 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama.....	93
4.3.2.4 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Umur .....	93
4.3.3 Kondisi Ekonomi,Sosial dan Budaya.....	94
4.3.3.1 Kondisi Ekonomi.....	94
4.3.3.2 Kondisi Sosial dan Budaya .....	95
4.4 Fasilitas dan Prasarana .....	95
4.4.1.1 Fasilitas.....	95
4.4.1.2 Prasarana .....	99
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>103</b>

5.1 Identifikasi Karakteristik Sosial Ekonomi Penduduk Di Kel.Sukaramai .....	105
5.2 Identifikasi Kondisi Utilitas dan Fisik Bangunan Tempat Tinggal.....	107
5.2.1 Kondisi Utilitas Di Kelurahan Sukaramai.....	107
5.2.1.1 Bangunan Gedung .....	107
5.2.1.2 Jalan Lingkungan .....	109
5.2.1.3 Penyediaan Air Minum .....	111
5.2.1.4 Drainase Lingkungan .....	113
5.2.1.5 Air Limbah.....	116
5.2.1.6 Pengelolaan Persampahan.....	118
5.2.1.7 Proteksi Kebakaran .....	121
5.2.1.8 Identifikasi Legalitas Tanah.....	121
5.2.1.9 Pertimbangan Lain .....	122
5.3 Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumh Sukaramai.....	123
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>132</b>
6.1 Kesimpulan .....	132
6.2 Saran.....	133

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Standar Minimal Komponen Fisik Prasarana Lingkungan .....	30
Tabel 2.2 Penelitian Terkait Dengan Penelitian Yang Dilakukan .....	59
Tabel 3.1 Rumus Perhitungan Tingkat Kekumuhan.....	76
Tabel 3.2 Variabel Penelitian.....	79
Tabel 3.3 Desain Survei .....	80
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan.....	82
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan.....	83
Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Kota Pekanbaru .....	85
Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Kota Pekanbaru .....	86
Tabel 4.5 Jenis Penggunaan Lahan Di Kota Pekanbaru .....	87
Tabel 4.6 Luas, Jumlah Penduduk,Dan Kepadatan Penduduk .....	88
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Jenis Kelamin.....	89
Tabel 4.8 Jumlah Luas Wilayah,Rukun Tetangga(RT) .....	91
Tabel 4.9 Jumlah Luas Wilayah,Jumlah Penduduk dan Jumlah.....	91
Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Status Pekerjaan.....	92
Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama .....	93
Tabel 4.12 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	94

Tabel 4.13 Jumlah Tempat Ibadah Di Kecamatan Pekanbaru Kota .....	95
Tabel 4.14 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan .....	96
Tabel 4.15 Jumlah Kesehatan Menurut Kelurahan Di Kec Pekanbaru Kota.....	97
Tabel 4.16 Jumlah Penduduk Rumah Tangga dan Ratarata .....	98
Tabel 4.17 Panjang Jalan Menurut Kelurahan dan Jenis Permukaan .....	99
Tabel 4.18 Jumlah Fasilitas Komunikasi menurut Kelurahan .....	102
Tabel 5.1 Lokasi Penetapan Kawasan Kumuh Sukaramai.....	103
Tabel 5.2 Tingkat Sosial,Ekonomi dan Kependudukan Sukaramai.....	106
Tabel 5.3 Perhitungan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Sukaramai.....	124
Tabel 5.4 Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria,Indikator .....	126
Tabel 5.5 Rekapitulasi Skoring dan Klasifikasi Penilaian Kawasan .....	131

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 1.1 Gambar Peta Administrasi Kota Pekanbaru.....	7
Gambar 1.2 Gambar Peta Kelurahan Kecamatan Pekanbaru Kota.....	8
Gambar 1.3 Kerangka Berpikir Penelitian.....	10
Gambar 2.1 Gambar Hipotesis Hirarki Jalan Perkotaan .....	38
Gambar 2.2 Gambar Tipikal Penampang Melintang Jalan Arteri Primer.....	40
Gambar 2.3 Gambar Tipikal Penampang Melintang Jalan Kolektor Primer .....	42
Gambar 2.4 Gambar Tipikal Penampang Melintang Jalan Lokal Primer.....	43
Gambar 2.5 Gambar Tipikal Penampang Melintang Jalan Arteri Sekunder .....	44
Gambar 2.6 Gambar Tipikal Penampang Melintang Jalan Kolektor Sekunder.....	45
Gambar 2.7 Gambar Tipikal Penampang Melintang Jalan lokal Sekunder.....	46
Gambar 4.1 Gambar Grafik Jumlah Menurut Status Pekerjaan.....	92
Gambar 4.2 Kondisi Sarana Peribadatan Di Kelurahan Sukaramai.....	96
Gambar 4.3 Kondisi Sarana Pendidikan Di Kelurahan Sukaramai.....	97
Gambar 4.4 Kondisi Sarana Kesehatan Di Kelurahan Sukaramai .....	98
Gambar 4.5 Kondisi Jaringan Air Minum Di Kelurahan Sukaramai.....	100
Gambar 4.6 Kondisi Jaringan Listrik Di Kelurahan Sukaramai .....	100

Gambar 5.1 Kondisi Bangunan Gedung .....	107
Gambar 5.2 Gambar Peta Mapping Kondisi Bangunan Gedung .....	108
Gambar 5.3 Kondisi Jalan Lingkungan.....	109
Gambar 5.4 Gambar Peta Mapping Kondisi Jalan Lingkungan .....	110
Gambar 5.5 Kondisi Air Minum .....	111
Gambar 5.6 Gambar Peta Mapping Kondisi Air Minum.....	112
Gambar 5.7 Kondisi Drainase .....	113
Gambar 5.8 Kondisi Drainase .....	114
Gambar 5.9 Gambar Peta Mapping Kondisi Drainase.....	115
Gambar 5.10 Kondisi Air Limbah .....	116
Gambar 5.11 Gambar Peta Mapping Kondisi Air Limbah .....	117
Gambar 5.12 Kondisi Persampahan.....	118
Gambar 5.13 Kondisi Persampahan.....	119
Gambar 5.14 Gambar Peta Mapping Kondisi Persampahan.....	120

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kawasan permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota di negara berkembang lainnya. Telaah tentang kawasan permukiman kumuh (*slum are*), pada umumnya mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut, dan ketiga dampak oleh kedua faktor kondisi tersebut.

Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunan yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Masyarakat yang berada pada lingkungan kumuh adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga yang difikirkan adalah konsep perencanaan permukiman yang berwawasan lingkungan dengan penyediaan prasarana yang secara operasionalnya mampu meningkatkan kualitas sosial dan fisik.

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwasannya

perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai upaya meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka dilakukan serangkaian kegiatan ditingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kelurahan/Desa secara sinergis dengan platform kolaborasi.

Provinsi Riau salah satu Provinsi besar di Indonesia yang banyak mengalami permasalahan permukiman sehingga menyebabkan permukiman terlihat kumuh. Berdasarkan SK Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh bahwasannya di Provinsi Riau memiliki 5 Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai permukiman kumuh diantaranya yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di

Kota Pekanbaru bahwasannya Kecamatan Pekanbaru Kota ini merupakan lokasi ditetapkannya sebagai permukiman kumuh dengan 3 ( tiga ) kelurahan yaitu di Kelurahan Tanah Datar, Kelurahan Kota Baru, dan Kelurahan Sukaramai. Untuk Kelurahan Sukaramai ditetapkan penetapan lokasi permukiman kumuh dengan luas 6,60 Ha dengan koordinat  $101^{\circ}26'41,525''E$  dan  $0^{\circ}31'28,610''N$ . Kondisi eksisting kawasan permukiman saat ini sangat memprihatinkan, dengan lokasi yang berada di pinggiran pusat kota yang dilewati oleh Sungai Sago. Kawasan yang dilewati sungai menempati batas lahan yang semestinya tidak diizinkan didirikan bangunan.

Permasalahan kawasan permukiman di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota sangat kompleks. Berdasarkan kondisi bangunan hunian terdapat banyak bangunan yang tidak tertata dan luas hunian yang tidak sesuai standar dan kelayakan teknis. Kondisi lingkungan permukiman padat dan jarak antara rumah cukup rapat. Kondisi jalan lingkungan permukiman tidak memenuhi standar dan kelayakan teknis, sehingga masih terdapat beberapa jalan setapak dengan lebar kecil sehingga hanya bisa dilewati kendaraan roda 2 (dua) dan beberapa dari jalan terbangun kondisinya telah rusak. Kondisi drainase lingkungan memiliki masalah sebagian dari drainase lingkungan belum terbangun, jarak antar bangunan rapat dan membantasi ruang untuk drainase. Hal ini merupakan kawasan rawan banjir dikarenakan drainase terbangun banyak tersumbat oleh sampah dan air tergenang / tak mengalir. Kondisi air minum memiliki masalah sebagian besar warga masih belum mendapatkan kebutuhan air bersih yang aman dan layak, begitu juga dengan kondisi sarana prasarana air limbah rumah tangga masih darurat dan tidak layak terutama pinggiran parit/sungai. Kondisi persampahan tidak dilayani

angkutan sampah perkotaan dan minimnya sarana dan prasarana pengolahan sampah, sampah berserakan di halaman rumah, saluran air dan pinggir jalan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut perlu dukungan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan. Untuk itu dari permasalahan-permasalahan tersebut perlu dilakukannya kajian untuk meningkatkan kondisi fisik lingkungan perumahan dan permukiman melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, drainase, air bersih, sanitasi dan sampah. Penelitian ini adalah suatu kajian mengenai ***“Analisis Tingkat Kekumuhan Pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Peningkatan urbanisasi yang telah terjadi setelah adanya perkembangan pembangunan di Kota Pekanbaru menjadi tidak terkendali ini dapat dilihat dari jumlah penduduk di Kecamatan Pekanbaru Kota yang meningkat mencapai 25.098 jiwa yang menyebabkan kepadatan kawasan permukiman menjadi tinggi dan berdampak pada munculnya kawasan permukiman kumuh.

Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota berdasarkan kondisi bangunan fisik tempat tinggal masih belum tertata dengan baik dan kurangnya ketersediaan prasarana permukiman seperti jalan lingkungan, saluran drainase, air bersih, saluran pembuangan limbah rumah tinggal dan persampahan tidak dikelola dengan baik. Kondisi ini menjadikan permukiman yang tak terencana dan tertata tersebut berpotensi kumuh.

Hal ini menjadikan Kelurahan Sukaramai perlu di analisis tingkat kekumuhannya. Oleh karena itu, beberapa kondisi permasalahan yang kemudian bisa dijadikan rumusan masalah dan kemudian akan dijabarkan dalam bentuk pembahasan yang bersifat ilmiah. Beberapa rumusan masalah tersebut adalah:

- a. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi penduduk di Kelurahan Sukaramai?
- b. Bagaimana kondisi prasarana di Kelurahan?
- c. Bagaimana tingkat kekumuhan di Kelurahan Sukaramai?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kekumuhan yang berada di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota.

### **1.4 Sasaran Penelitian**

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka sasaran dari penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi penduduk di Kelurahan Sukaramai
- b. Mengidentifikasi kondisi prasarana di Kelurahan Sukaramai
- c. Menganalisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Sukaramai

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengidentifikasi prasarana yang ada di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota

2. Dapat menjadi acuan untuk Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan program pembangunan di Kota Pekanbaru khususnya di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota.
3. Dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dan para peneliti selanjutnya terutama yang berhubungan dengan strategi pengananan wilayah kumuh

### **1.6 Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah atau lokasi studi yang dijadikan objek penelitian ini berada di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota.

Batas wilayah Kelurahan Sukaramai dapat dilihat pada peta dibawah ini :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sago
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanah Datar
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Tinggi
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru

**PETAAA**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## PETAA



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

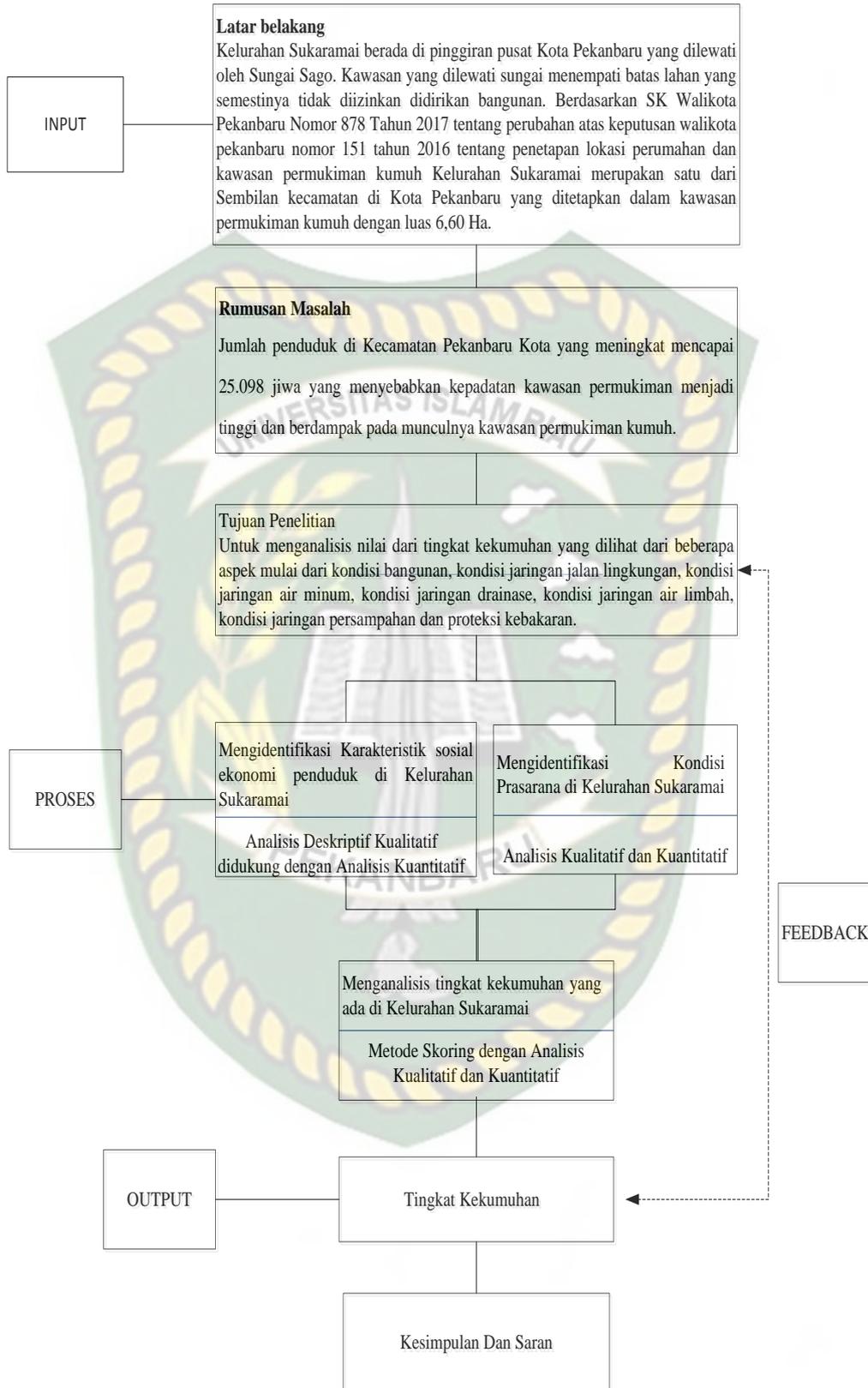
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## 1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan cara berpikir dengan menuangkan dalam suatu pola yang menganalisis permasalahan dalam suatu wilayah studi, serta mencoba memberi alternatif solusi dari permasalahan yang terjadi. Kerangka pemikiran ini dituangkan dalam suatu skema diagram dengan penjelasan dari aspek-aspek yang akan di bahas dalam penelitian ini.

Keadaan Kota Pekanbaru dengan permukiman kumuh dan kurangnya ketersediaan akan prasarananya dan semakin pesatnya jumlah penduduk dan keterbatasan lahan di kota, sehingga mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dalam masyarakatnya. Kondisi ini tentu sangatlah terkait dengan timbulnya kantung-kantung kemiskinan dilihat dalam bentuk permukiman yang terjadi biasanya berupa permukiman kumuh (*Slum area*) dan cenderung meluas.

Kajian ini diawali dengan mengidentifikasi kondisi prasarana permukiman kumuh dan tingkat kekumuhan pada permukiman di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Pekanbaru Kota di Kelurahan Sukaramai. Dari hasil beberapa proyek yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah maupun dinas yang terkait dapat menjadi acuan bagi data sekunder dalam menganalisa sementara pada kondisi prasarana yang ada pada permukiman kumuh di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota. Berikut Gambar 1.3 kerangka pemikiran dari permasalahan dalam wilayah studi di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota.



**Gambar 1.3 Kerangka Berpikir Penelitian**

*Sumber: Hasil Analisis, 2019*

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penulisan ini yang kemudian dibagi kedalam beberapa bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan topik kajian studi beserta latar belakang penelitian yang diambil. Kemudian akan dikaji rumusan permasalahan yang terkait, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup penelitian. Kerangka pemikiran penelitian, selain itu juga akan dijabarkan sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan tentang kajian literatur, terutama mengenai definisi utilitas, permukiman, permukiman kumuh, karakteristik permukiman kumuh, faktor-faktor penyebab timbulnya permukiman kumuh, definisi konsep kampung improvement program dan partisipasi masyarakat dalam upaya kampung improvement program untuk permukiman kumuh.

### **BAB III METEDOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menyajikan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan mencapai tujuan penelitian. Selain itu, dalam metode penelitian ini juga terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, variabel dan tahapan penelitian, beserta teknik pengumpulan data dan teknik proses analisisnya.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

Pada bab ini dipaparkan gambaran umum wilayah studi dan objek studi yang meliputi gambaran umum Kota Pekanbaru, penggunaan lahan, demografi dan perekonomiannya. Selain itu juga dipaparkan mengenai gambaran umum lokasi studi yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota yang meliputi penggunaan lahan, kondisi internal masyarakat yang meliputi ekonomi, sosial, budaya, serta gambaran mengenai lingkungan permukiman kumuh dan program penataan permukiman kumuh yang sudah dilakukan di Kecamatan Pekanbaru Kota.

## **BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dilakukan analisis data survei primer dan sekunder, mengidentifikasi tingkat kekemuhan di Kecamatan Pekanbaru Kota, menganalisis kawasan permukiman kumuh, menganalisis prasarana permukiman, menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan dan merumuskan strategi penanganan utilitas dalam penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Pekanbaru kota.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Memuat hasil analisa sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Babi ini juga membuat rekomendasi akhir berupa saran kepada pihak-pihak terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pandangan islam selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia. Dimana dijelaskan dalam QS Ar Rum : 41-42 yaitu :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا  
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Terjemahanya :

“Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah : Adakanlah perjalanandimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (Q.S Ar Rum : 41-42)

Dimana maksud ayat tersebut yaitu islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan. Hal ini seringkali tercermin dalam beberapa pelaksanaan ibadah, seperti ketika menunaikan ibadah haji. Dalam haji, umat

Islam dilarang menebang pohon-pohon dan membunuh binatang. Apabila larangan itu dilanggar maka ia berdosa dan diharuskan membayar denda (dam). Lebih dari itu Allah SWT melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Sehingga dalam hal ini jika terjadi kerusakan maka perlu di rehabilitasi atau diperbaiki agar menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

Selain itu dalam padangan islam bumi diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan seperti yang tercantum dalam QS Al A'raf : 56-58 yaitu :

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا  
 أَقْلَتِ سَحَابًا نُّقِلَ أَلا سُقِنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ  
 مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  
 ۝۵۷ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ  
 إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝۵۸

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahma Nya (hujan) hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang

baik, tanam-tanamannya tumbuh dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS Al A’raf : 56-58).

Dimana maksud ayat tersebut yaitu bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmat-Nya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lain-lain semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan. Maka dari itu perlu dilakukannya peremajaan atau perbaikan untuk menjaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

## 2.1 Karakteristik Sosial Ekonomi Penduduk

Karakteristik merupakan pengembangan kata dari kata dasar “karekter”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1994) karakteristik adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain, tabiat atau watak. Sedangkan karakteristik sendiri adalah ciri-ciri khusus yang mempunyai sifat khas sesuai perwatakan.

Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok [masyarakat](#) yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan. Dalam pembahasannya [sosial](#) dan [ekonomi](#) sering menjadi objek pembahasan yang berbeda. Dalam konsep [sosiologi manusia](#) sering disebut dengan makhluk [sosial](#) yang artinya [manusia](#) tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga arti [sosial](#) sering diartikan sebagai hal

yang berkenaan dengan masyarakat. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan.

## **2.1.1 Karakteristik Sosial**

### **2.1.1.1 Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi daya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan pendidikan menurut Amelia (2012) adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan dibagi tiga, yaitu :

1. Pendidikan Formal, adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi jenjang pendidikan formal:
  - a. Pendidikan Dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS).
  - b. Pendidikan Menengah, merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejurusan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), serta bentuk lain yang sederajat.

- c. Pendidikan Tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, dan Sarjana.
2. Pendidikan Non Formal, adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan dengan terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal.
3. Pendidikan Informal, adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan informal diakuisama dengan pendidikan formal maupun informal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

#### **2.1.1.2 Kondisi Rumah**

Kondisi rumah ditekankan pada kenampakan fisik secara umum berdasarkan bahan bangunan yang digunakan, karena hal itu akan berpengaruh terhadap bangunan rumah yang nantinya akan ada penghargaan atau prestise tersendiri dari masyarakat terhadap rumah tersebut. Selain itu juga dilihat dari luas bangunan rumahnya, luas bangunan untuk kegiatan ekonomi yaitu rumah mukim saja, rumah mukim dan industri, pemilihan lokasi rumah yaitu rumah warisan keluarga, lokasi yang dekat dengan pasar. Atau hal yang lain juga penggunaan ventilasi pada rumah yaitu ventilasi alamiah, ventilasi buatan dan ventilasi yang lain yang kesemuannya itu akan diuraikan satu persatu.

Berdasarkan ketetapan WHO 1974 dalam Musiyani 1988 dalam Gunadi 2003 dengan modifikasi bahwa bangunan rumah yang kondisi fisiknya berlantai

semen/tegel/teras, berdinding batubata merah/batako, beratap seng/genteng dan berkerangka kayu/besi/beton disebut bangunan permanen. Sedangkan bangunan rumah dengan kondisi fisik berlantai semen/tegel, dinding setengah bata/batako dengan bambu/kayu, beratap seng/genteng, berkerangka kayu/bamboo disebut bangunan semi permanen. Bangunan rumah yang kondisi fisiknya berlantai tanah/kayu/semen, berdinding kayu/bambu dengan beratap seng/genteng dan berkerangka kayu atau bambu disebut bangunan non permanen.

## **2.1.2 Karakteristik ekonomi**

### **2.1.2.1 Jenis Pekerjaan**

Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan tolok ukur produktivitas kegiatan, antara lain adalah status kerja, jenis pekerjaan, jumlah hari kerja, dan jam kerja. Beberapa indikator yang dicoba dikaji ternyata tidak semua menunjukkan adanya kaitan yang jelas antara kegiatan kepala rumah tangga dengan kemiskinan. Variabel lain yang bisa menerangkan kemiskinan dengan pekerjaan adalah jumlah pekerja dalam rumah tangga dan jumlah jam kerja total dari anggota rumah tangga yang bekerja tersebut.

Jenis pekerjaan utama dalam rumah tangga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan rumah tangga. Jenis pekerjaan utama dalam rumah tangga merupakan faktor penentu besarnya pendapatan (dan pengeluaran) yang diterima oleh rumah tangga (Gounder, 2005). Menurut Butar (2008) pekerjaan utama kepala rumah tangga sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan suatu rumah tangga, hal ini dikarenakan tiap jenis pekerjaan memiliki tingkat upah yang berbeda-beda. Pada sektor pertanian tingkat upah minimum yang akan diterima

oleh pekerjanya akan lebih rendah dibandingkan pada sektor lain (seperti: industri) dan di Indonesia mayoritas kepala rumah tangga miskin cenderung bekerja pada sektor pertanian baik dalam sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan maupun perikanan.

Semua pekerjaan yang digeluti sebagian besar adalah sektor informal, yaitu sebuah pekerjaan yang tanpa ikatan, tidak tetap, dinamis, diatur sendiri. Pekerjaan tersebutlah yang mampu diraih. Pekerjaan ini mengandung kerentanan yang tinggi. Pada satu situasi pekerjaan ini tidak menghasilkan uang, keluarga akan dipertaruhkan (Kertati, 2013).

#### **2.1.2.2 Pendapatan**

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Dengan demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Pendapatan keluarga berupa jumlah keseluruhan pendapatan dan kekayaan keluarga, dipakai untuk membagi keluarga dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu pendapatan rendah, pendapatan menengah dan pendapatan tinggi. Pembagian di atas berkaitan dengan status, pendidikan dan keterampilan serta jenis pekerja seseorang namun sifatnya sangat relatif (Bangbang Prayuda, 2014).

Menurut Yudhohusodo dalam Poniwati (2006) tingkat pendapatan seseorang dapat digolongkan dalam 4 golongan yaitu :

- a) Golongan yang berpenghasilan rendah (*Low income group*) yaitu pendapatan rata-rata dari Rp 150.000 perbulan.

- b) Golongan berpenghasilan sedang (*Moderate income group*) yaitu pendapatan rata-rata Rp 150.000 – Rp 450.000 perbulan.
- c) Golongan berpenghasilan menengah (*Midle income group*) yaitu pendapatan rata-rata yang diterima Rp 450.000 – Rp 900.000 perbulan.
- d) Golongan yang berpenghasilan tinggi (*High income group*) yaitu rata-rata pendapatan lebih dari Rp 900.000 perbulan.

## 2.2 Pengertian Permukiman

Secara ilmu bahasa, kata permukiman tergolong ke dalam kata benda. Dalam bahasa Inggris, permukiman dikenal sebagai *Human Settlement*, yaitu suatu kumpulan manusia baik di kota maupun di desa, lengkap dengan aspek-aspek sosial, spritual, dan nilai-nilai budaya yang menyertainya. Beberapa konsep yang menyangkut permukiman, menurut Finch (1957 dalam Muta'ali 2015), *Settlement* atau permukiman adalah kelompok satuan-satuan tempat tinggal atau kediaman manusia yang mencakup fasilitas seperti bangunan rumah, jalur jalan, dan fasilitas lain yang digunakan sebagai sarana pelayanan manusia tersebut. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Permukiman dan Perumahan yang dimaksud adalah:

- a. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
- b. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

- c. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.

Menurut Barlow dan Newton (1971) dalam Nugroho (2010) permukiman adalah semua tipe tempat tinggal manusia baik gubuk atau pondok tunggal beratapkan dedaunan, atau rumah-rumah diperladangan hingga permukiman yang sangat besar/kota dengan ribuan tempat tinggal.

*The American Public Health Association* (APHA,1960) dalam Rindarjono (2012) permukiman adalah sebagai suatu bangunan rumah yang mengacu pada fungsi pokok rumah bagi manusia yaitu tempat untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, tempat untuk berlindung dari penularan penyakit menular, serta berlindung dari gangguan keamanan atau kecelakaan.

Sastra M dkk (2006) menjelaskan bahwa esensi permukiman meliputi manusia serta wadahnya ( tempat) maka perlu memahami dengan baik hubungan antara elemen-elemen permukiman dengan manusia yang saling mempengaruhi keberadaan satu dengan lainnya. Perencanaan suatu permukiman membutuhkan berbagai pengkajian, tidak hanya terhadap factor-faktor fisik saja, akan tetapi juga harus mempertimbangkan factor manusianya sebagai pelaku kehidupan yang utama.

Lingkungan permukiman yang sehat merupakan kumpulan rumah sehat yang teratur tata letaknya dan mempunyai fasilitas lingkungan, seperti:

- a. Pencapaian

- b. Jaringan jalan selalu tersedia dan juga saluran air hujan/air kotor disisi kanan kiri jalan.
- c. Tersedianya wc umum bagi masyarakat yang tidak memiliki sendiri.
- d. Kelestraian lingkungan.

Berdasarkan dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan permukiman adalah suatu lingkungan hunian terdiri dari beberapa kelompok rumah atau perumahan diluar kawasan lindung dan dilengkapi sarana dan prasana sebagai tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kondisi perumahan dan permukiman di Indonesia pada saat ini masih ditandai oleh : (1) belum mantapnya system peneyelenggaraan, termasuk system kelembagaan yang diperlukan, (2) rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, (3) menurunnya kualitas lingkungan permukiman, secara fungsional kualitas pelayanan sebagaian besar perumahan dan permukiman yang masih ada terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai (Sugandhy dkk,2009).

### **2.2.1 Permukiman Padat di Kawasan Perkotaan**

Kawasan perkotaan pada umumnya merupakan pusat kegiatan ekonomi (perdagangan dan industri), pusat pemerintahan maupun pusat kegiatan budaya dan pariwisata (Surtiani, 2006). Peningkatan ekonomi saat ini mengakibatkan pusat-pusat kota tersebut menjadi sasaran investasi atau penanaman modal masyarakat baik dalam skala besar maupun skala kecil ( sector informal). Kebijakan ekonomi

suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini akan menyebabkan perkembangan kegiatan di pusat kota berjalan sangat besar.

Pertumbuhan pusat kota ini menjadikan daya tarik bagi masyarakat untuk mendapatkan pertumbuhan penghasilan di pusat kota tersebut. Baik untuk masyarakat pencari kerja maupun yang ingin membuka usaha. Masyarakat yang bekerja di pusat kota akan mencari tempat tinggal yang tidak jauh dari tempat dia kerja. Maka dipilihlah permukiman di pusat kota. Keuntungan permukiman di pusat-pusat kota ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai serta aksesibilitas yang mudah. Nilai dari suatu kualitas permukiman sangat ditentukan oleh fasilitas dan kondisi lingkungannya. Kelengkapan fasilitas di lingkungan sekitar permukiman sangat mempengaruhi kualitas permukiman itu sendiri. Menurut Schmetzer and Muntaz (1976) dalam Surtiani (2006) menyebutkan bahwa ada beberapa indikator yang mempengaruhi nilai suatu perumahan antara lain:

- a. Kondisi dari bangunan-bangunnya.
- b. Ketersediaan air, sistem drainase yang baik, tersedianya pembuangan sampah yang memadai
- c. Kemudahan akses ke fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, ketersediaan sekolah dan mudah dicapai dengan angkutan umum
- d. Ketersediaan fasilitas umum seperti tempat ibadah dan rekreasi
- e. Kepadatan penduduk yang tidak terlalu tinggi
- f. Keamanan dan kesehatan yang terjamin.

### **2.2.2 Faktor Penyebab Pertumbuhan Kawasan Permukiman**

Dalam perkembangannya perumahan permukiman di pusat kota ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Constantinos A. Doxiadis disebutkan bahwa perkembangan perumahan permukiman (*Development Of Human Settlement*) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. *Growth of density* (Pertambahan Jumlah Penduduk) dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian semakin bertambah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.
2. *Urbanization* (Urbanisasi) dengan adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanis yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memilih untuk tinggal di permukiman di sekitar kawasan pusat kota (*Down Town*). Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota.

### **2.2.3 Pengertian Permukiman Kumuh**

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016).

Menurut *World Bank* 1999 dalam Musthofa (2011) lingkungan permukiman kumuh digambarkan sebagai bagian yang terabaikan dari lingkungan

perkotaan dimana kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan, yang diantaranya ditunjukkan dengan kondisi lingkungan hunian yang tidak layak huni, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sarana dan prasarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat, tidak tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan maupun sarana dan prasarana sosial budaya kemasyarakatan yang memadai.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Menurut Rindrojono (2013) Kumuh adalah gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan rendah. Dengan kata lain, kumuh dapat di artikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan.

Berdasarkan pendapat (Arharya 2010 dalam Muta'ali 2015), kawasan kumuh di definisikan sebagai hunian yang tidak memadai karena tidak adanya ketersediaan fisik (ruang terbuka hijau/RTH, drainase, suplai air bersih, jaringan komunikasi, dan lain-lainnya) dan fasilitas sosial (organisasi, sosial kesehatan dan sebagainya). Sedangkan menurut (Suparlan 2004 dalam Muta'ali 2015) mengartikan kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat dikawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air

bersih, sanitasi, persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta fasilitas sosial lainnya. Kawasan kumuh adalah awasan yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknik maupun nonteknis.

Muta'ali (2006) menjelaskan dari hasil observasi lapangannya menyebutkan bahwa ciri-ciri kawasan permukiman kumuh yang menonjol dan perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Rumah beratapkan jerami
- b. Rumah tanpa jendela/ventilasi udara dan sinar matahari tidak dapat masuk.
- c. Tidak terdapat pembagian ruang/kamar sesuai dengan peruntukannya
- d. Dinding dan lantai telat lapuk.
- e. Banyak dihuni oleh anggota rumah tangga tidak produktif
- f. Tidak memiliki jamban
- g. Berada pada lingkungan permukiman dengan sanitasi jelek.

Dari hasil penelitian Nursyahbani dkk (2015) terdapat beberapa temuan tentang permukiman kumuh:

1. Sarana dan prasarana air bersih belum terdistribusi merata, pembuangan air kotor dan pembuangan sampah belum memenuhi persyaratan kesehatan
2. Banyaknya kualitas bangunan yang rendah dan tidak layak huni
3. Memiliki tingkat kepadatan yang tinggi
4. Sebagian besar bangunan tidak memiliki sertifikat hak milik tanah dan bangunan.

5. Salah satu penyebab tingginya tingkat kepadatan perumahan adalah karena penduduknya pendatang yang tinggal dan menetap karena alasan letak lokasi dan keberadaan keluarga sudah tinggal di lokasi. Hal ini menyebabkan rumah tumbuh padat dan tidak teratur dan kondisi prasarana yang buruk
6. Kondisi sosial ekonomi penduduk yang umumnya berpenghasilan sangat rendah, menyebabkan rendahnya motivasi penduduk untuk memiliki rumah yang layak dan sehat. Kemudian implikasi dari tingginya tingkat kepadatan bangunan di lokasi menyebabkan kurangnya vegetasi dan ruang terbuka hijau.

Kedua kumuh dapat mencerminkan keadaan ekonomi, sosial dan budaya para penghuni permukiman tersebut. Ciri-ciri kawasan kumuh dapat tercermin dari (Srinivas, 2003):

1. Penampilan fisik bangunannya yang miskin konstruksi yaitu banyaknya bangunan-bangunan temporer yang terdiri serta Nampak tak terurus maupun tanpa perawatan
2. Pendapatan yang rendah mencerminkan status ekonomi mereka, biasanya masyarakat kawasan kumuh berpenghasilan rendah.
3. Kepadatan bangunan yang tinggi, dapat terlihat tidak adanya jarak antar bangunan maupun siteplan yang terencana
4. Kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakatnya yang heterogen
5. Sistem sanitasi yang miskin atau tidak dalam kondisi yang baik

6. Kondisi sosial yang tidak baik dapat dilihat dengan banyaknya tindakan kejahatan maupun criminal
7. Banyaknya jumlah masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan menyewa rumah.

Menurut Ditjen Bangda Depdagri dalam penelitian Wahyuni (2012), ciri-ciri permukiman atau daerah perkampungan kumuh dan miskin dipandang dari segi sosial ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah, serta memiliki sistem sosial yang rentan.
2. Sebagiaian besar penduduknya berusaha atau bekerja di sektor informal  
Lingkungan permukiman, rumah, fasilitas dan prasarananya di bawah standar minimal sebagai tempat bermukim, misalnya memiliki:
  - a. Kepadatan penduduk yang tinggi  $> 20$  jiwa/km<sup>2</sup>
  - b. Kepadatan bangunan  $> 110$  bangunan/Ha.
  - c. Kondisi prasarana buruk (jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan).
  - d. Kondisi fasilitas lingkungan terbatas dan buruk, terbangun  $< 20\%$  dari luas persampahan
  - e. Kondisi bangunan rumah tidak permanen dan tidak memenuhi syarat minimal untuk tempat tinggal.
  - f. Permukiman rawan terhadap banjir, kebakaran, penyakit dan keamanan.
  - g. Kawasan permukiman dapat atau berpotensi menimbulkan ancaman (fisik dan non fisik) bagi manusia dan lingkungannya.

#### 2.2.4 Karakteristik Permukiman Kumuh

Menurut Fitria dkk (2014) masing-masing permukiman kumuh yang memiliki karakteristik masing-masing ditemukan beberapa kecenderungan yang kemudian membentuk karakter spesifik di masing-masing permukiman kumuh adalah:

- a. Pada permukiman kumuh ringan, keberadaan kegiatan ekonomi yang berada disekitarnya, turut mempengaruhi karakter yang dimiliki oleh permukiman tersebut, seperti misalnya dalam hal kondisi prasarana drainase, asal daerah masyarakat, status kependudukan masyarakat, asal pemilihan lokasi bermukim, dan jenis pekerjaan.
- b. Pada permukiman kumuh sedang, umumnya kondisi cenderung menengah, dimana terdapat beberapa aspek yang memiliki kesamaan dengan permukiman kumuh ringan, seperti misalnya dalam hal tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan ketinggian genangan. Namun terdapat beberapa aspek pula yang memiliki kesamaan dengan permukiman kumuh berat, seperti dalam hal prasarana drainase, alasan memilih lokasi bermukim, dan status kependudukan masyarakat.

Pada permukiman kumuh berat, ternyata terdapat kecenderungan bahwa semakin buruk tingkat kategori kumuhnya, semakin buruk pula kondisinya dibandingkan dengan kedua kategori permukiman kumuh lainnya ( ringan dan sedang) terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasaran, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan juga bahaya (*hazard*) terhadap

banjir/genangan. Adapun standar minimal komponen fisik prasarana lingkungan dapat dilihat pada Tabel 2.1.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**Tabel 2.1 Standar Minimal Komponen Fisik Prasarana Lingkungan Permukiman**

No	Komponen	Kriteria Teknis	Keterangan
1	Jaringan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jarak minimum setiap rumah 100 m dari jalan kendaraan satu arah dan 300 m dari jalan 2 arah.</li> <li>b. Lebar perkerasan minimum untuk jalan 2 arah 4 m.</li> <li>c. Kepadatan jalan minimal 50-100 m/ha untuk jalan 2 arah.</li> <li>d. Pedestrian yang diperkeras minimal berjarak 20 m, dengan perkerasan 1- 3 m.</li> </ul>	Pada prinsipnya, jaringan jalan harus mampu melayani kepentingan mobil kebakaran. Disamping itu, maksimal 15 menit jalan kaki harus terlayani oleh angkutan umum. Dimensi minimal pejalan kaki sebanding dengan Lebar gerobag dorong/becak.
2.	Air Bersih (Kran dan umum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas layanan minimum 20l/org/hari</li> <li>b. Kapasitas jaringan minimum 60 lt/org/hr</li> <li>c. Cakupan layanan 20-50 kk/unit</li> <li>d. Fire Hidrant dalam radius 60 m-120 m</li> </ul>	Perehitungan kebutuhan lebih rinci mengenai kran umum didasarkan atas jumlah pelanggan PAM dan kualitas air setempat
3.	Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tangki septict individu, resapan individu</li> <li>b. Tangki septict bersama, resapan bersama Mini IPAL</li> </ul>	Pada prinsipnya, lingkungan harus Bersih dari pencemaran limbah rumah tangga
4.	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Minimal jarak TPS/Transfer</li> <li>b. Depo 15 menit perjalanan gerobag sampah</li> <li>c. Setiap gerobag melayani 30 sampai 50 unit rumah</li> <li>d. Pengelolaan sampah lingkungan ditangani masyarakat setempat.</li> </ul>	Pelayanan sampah sangat tergantung Pada sistim penanganan lingkungan/sector kota. Pada prinsipnya pelayanan sampah yang dikelola lingkungan mampu dikelola oleh lingkungan yang bersangkutan.
5.	Drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jaringan drainase dibangun memanfaatkan jaringan jalan dan badan air yang ada.</li> <li>b. Dimensi saluran diperhitungkan atas dasar layanan (coverage area) blok/lingkungan bersangkutan.</li> <li>c. Penempatan saluran memperhitungkan ketersediaan lahan (dapat disamping atau dibawah jalan).</li> <li>d. Jika tidak tersambung dengan sistim kota, harus disiapkan resapan setempat atau kolam retensi.</li> </ul>	Bentuk penanganannya dapat merupakan bagian dari sistim jaringan kota atau sistim setempat

Sumber : Dasar-dasar Perencanaan Perumahan oleh Dipusbindiklatren Bappenas, 2003

### 2.3 Pengertian Infrastruktur

Dalam istilah Kamus Pengembangan Wilayah Tahun 2016 infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Menurut Kodoatie (2005), pengertian infrastruktur adalah suatu sistem yang menunjang sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, dimana sistem ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa infrastruktur merupakan aset (fisik dan non fisik) yang dirancang dalam sistem agar mampu melayani masyarakat. adapun beberapa jenis infrastruktur adalah sebagai berikut:

#### 1. Infrastruktur Keras

Adalah semua infrastruktur yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas umum berwujud fisik. Beberapa yang termasuk dalam infrastruktur keras diantaranya;

- a. Jalan raya
- b. Bandar udara
- c. Jalur kereta api
- d. Pelabuhan
- e. Saluran irigasi
- f. Dan lain-lain

## 2. Infrastruktur Keras Non-Fisik

Adalah semua infrastruktur yang berhubungan dengan fungsi utilitas publik.

Beberapa yang termasuk dalam infrastruktur keras non-fisik diantaranya;

- a. Pengadaan air bersih
- b. Penyediaan pasokan listrik
- c. Penyediaan jaringan telekomunikasi
- d. Penyediaan pasokan energi
- e. Dan lain-lain

## 3. Infrastruktur Lunak

Infrastruktur lunak adalah semua yang berhubungan dengan sistem, nilai, norma, peraturan, dan pelayanan publik, yang disediakan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah. Beberapa yang termasuk infrastruktur lunak diantaranya;

- a. Etika kerja
- b. Peraturan lalu lintas
- c. Pelayanan publik yang berkualitas
- d. Undang-undang hukum (perdagangan, pernikahan, dan lain-lain).
- e. Dan lain-lain

Infrastruktur menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Pengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sebagainya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi masyarakat (Grigg dalam Wijayanti 2016).

#### **2.4 Pengertian Utilitas**

Dalam istilah Kamus Pengembanagan Wilayah Tahun 2016 utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan yang meliputi antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi dan pemadam kebakaran.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 38/prt/m/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum, prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman, sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, dan Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan.

#### 2.4.1 Pengertian Prasarana dan Sarana

Dalam istilah Kamus Pengembangan Wilayah Tahun 2016 prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (*Spatial Space*) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Kelengkapan dasar fisik yang menunjang aktivitas suatu lingkungan, kawasan kota atau wilayah yang didalamnya termasuk aksesibilitas, bangunan gedung, sanitasi, drainase, sistem penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, persampahan, proteksi kebakaran dan ruang terbuka hijau.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunia yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. Tiap-tiap jenis prasarana memiliki standard an ketentuan yang berbeda-beda tergantung fungsinya. Terdapat delapan jenis prasarana lingkungan yang harus tersedia di lingkungan permukiman, yaitu (SNI 03-1733-2004) Prasarana jaringan jalan, Prasarana jaringan drainase, Prasarana jaringan air bersih, Prasarana jaringan air limbah, Prasarana jaringan persampahan, Prasarana jaringan listrik, Prasarana jaringan telepon, dan Prasarana jaringan transportasi lokal.

Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.(Kamus Istilah Pengembangan wilayah, 2016). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan

pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, meliputi sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olah raga, sarana pemakaman, dan sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau, sarana tersebut sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Adapun sarana penunjang (utilitas) untuk pelayanan lingkungan, meliputi jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran dan sarana penerangan jalan umum.

#### **2.4.2 Prasarana Jaringan Jalan**

Jalan merupakan prasarana lingkungan yang berupa suatu jaringan. Fungsi utama jaringan jalan adalah untuk mempermudah pergerakan manusia dan kendaraan. Jaringan jalan juga memiliki fungsi penting sebagai akses penyelamatan dalam kendaraan darurat. Jaringan jalan yang baik pada suatu kawasan permukiman harus memiliki pola hubungan yang jelas antara jalan utama dengan jalan kolektor atau jalan lokalnya. Agar jalan pada suatu kawasan dapat berfungsi dengan sempurna maka dalam perencanaan perlu mengacu pada sistem hierarki jalan. Sistem hierarki jalan mengklasifikasikan jalan berdasarkan kecepatan kendaraan, lebar badan jalan, dan garis sempadan jalan. Dalam sistem hierarki jalan, jalan diklasifikasikan ke dalam 6 jenis yaitu jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer, dan jalan lokal sekunder.

Jaringan jalan dibangun untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya. Diantara pengguna jalan, ada yang bejalan kaki, ada yang

mengendarai, ada yang bersepeda dan ada yang menggunakan kendaraan bermotor. Jaringan jalan yang baik harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pergerakan manusia. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi penggunaannya maka jaringan jalan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. memiliki permukaan yang rata
2. memiliki trotoar untuk memisahkan sekaligus melindungi pejalan kaki dari pergerakan kendaraan.
3. Tersedia rambu-rambu dan petunjuk arah yang jelas.
4. Memiliki sistem drainase yang baik agar permukaan jalan tidak tertutup oleh air pada saat hujan
5. Memiliki lahan parkir yang cukup dan tidak mengganggu lalu lintas dan
6. Memiliki lanskap yang baik untk memberikan rasa nyaman.

Setiap bidang jalan memiliki bagian-bagian penting yang dinamai dengan istilah-istilah teknis. Istilah-istilah teknis tersebut ditetapkan untuk menggambarkan fungsi, manfaat, dan kegunaannya (SNI 03-1733-2004) yaitu :

1. Damija (daerah milik jalan)

Damija merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan. Damija diperuntukkan bagi daerah manfaat jalan (damaja) dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengamatan jalan.

2. Damaja (daerah manfaat jalan)

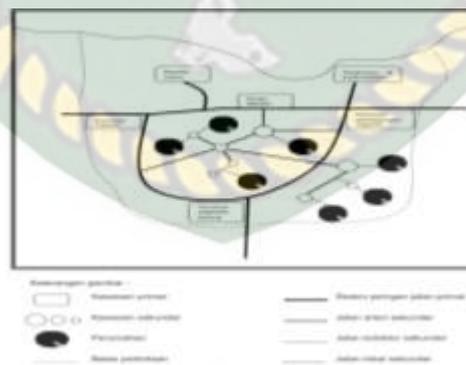
Damaja merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi, dan kedalaman ruang batas tertentu. Ruang tersebut diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

3. Dawasja (daerah pengawasan jalan)

Dawasja merupakan ruang sepanjang jalan diluar daerah milik jalan (damija) yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.

#### 2.4.2.1 Kriteria Penetapan Klasifikasi Fungsi Jalan

Ketentuan teknis (Kriteria penetapan klasifikasi fungsi jalan), berikut adalah gambar hipotesis hirarki jalan perkotaan dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Hipotesis Hirarki Jalan Perkotaan

*Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2006*

## 1. Jalan Arteri Primer

Untuk penentuan klasifikasi fungsi jalan arteri primer harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

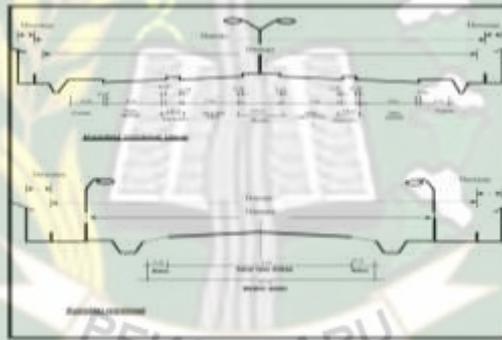
### A. Kriteria-kriteria jalan arteri primer terdiri atas:

1. Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam (km/h)
2. Lebar badan jalan arteri primer paling rendah 11 (sebelas) meter
3. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien; jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 500 meter
4. Persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya
5. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata
6. Besarnya volume lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih besar dari fungsi jalan yang lain
7. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan dan lain-lain
8. Jalur khusus seharusnya disediakan, yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya
9. Jalan arteri primer seharusnya dilengkapi dengan median jalan.

### B. Ciri-ciri jalan arteri primer terdiri atas :

1. Jalan arteri primer dalam kota merupakan terusan jalan arteri primer luar kota

2. Jalan arteri primer melalui atau menuju kawasan primer
3. Lalu lintas jarak jauh pada jalan arteri primer adalah lalu lintas regional; untuk itu, lalu lintas tersebut tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, dan lalu lintas lokal, dari kegiatan lokal
4. Kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan umum bus dapat diijinkan melalui jalan ini
5. Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan tidak diijinkan
6. Jalan arteri primer dilengkapi dengan tempat istirahat pada setiap jarak 25 km.



Gambar 2.2 Tipikal Penampang Melintang Jalan Arteri Primer  
*Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2006*

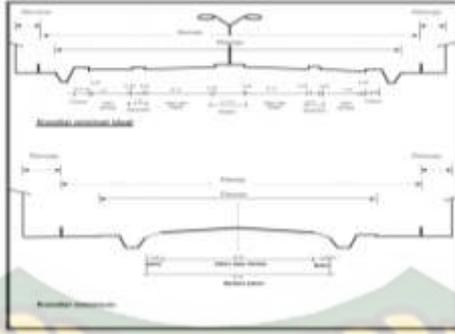
## 2. Jalan Kolektor Primer

Untuk penentuan klasifikasi fungsi jalan kolektor primer harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

### A. Kriteria-kriteria jalan kolektor primer terdiri atas

1. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km/h
2. Lebar badan jalan kolektor primer paling rendah 9 (sembilan) meter

3. Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien; jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 meter
  4. Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya
  5. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata
  6. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas dan lampu penerangan jalan
  7. Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari jalan arteri primer
  8. Dianjurkan tersedianya jalur khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya.
- B) Ciri-ciri jalan kolektor primer terdiri atas :
1. Jalan kolektor primer dalam kota merupakan terusan jalan kolektor primer luar kota;
  2. Jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan arteri primer;
  3. Kendaraan angkutan barang berat dan bus dapat diijinkan melalui jalan ini;
  4. lokasi parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diijinkan pada jam sibuk.



Gambar 2.3 Tipikal Penampang Melintang Jalan Kolektor Primer  
*Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2006*

### 3. Jalan Lokal Primer

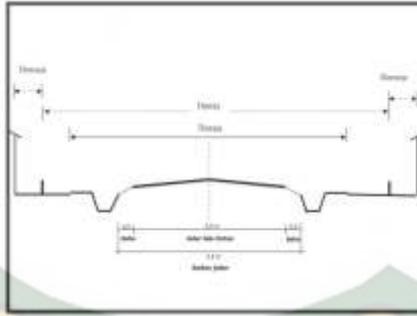
Untuk penentuan klasifikasi fungsi jalan lokal primer harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

#### A. Kriteria-kriteria jalan lokal primer terdiri atas :

1. Jalan Lokal Primer Didesain Berdasarkan Kecepatan Rencana Paling Rendah 20 (Dua Puluh) Km/H
2. Lebar Badan Jalan Lokal Primer Paling Rendah 6,5 (Enam Setengah) Meter
3. Besarnya Lalu Lintas Harian Rata-Rata Pada Umumnya Paling Rendah Pada Sistem Primer.

#### B. Ciri-ciri jalan lokal primer terdiri atas :

1. Jalan lokal primer dalam kota merupakan terusan jalan lokal primer luar kota
2. Jalan lokal primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan primer lainnya;
3. Kendaraan angkutan barang dan bus dapat diijinkan melalui jalan ini.



Gambar 2.4 Tipikal Penampang Melintang Jalan Lokal Primer  
*Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2006*

#### 4. Jalan Arteri Sekunder

Untuk penentuan klasifikasi fungsi jalan arteri sekunder harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

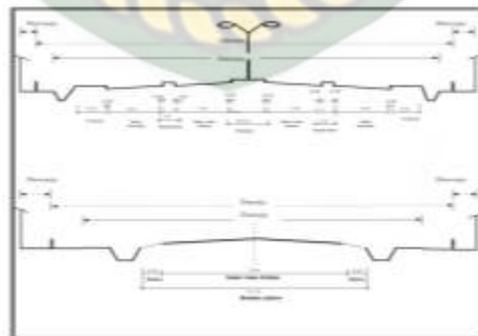
##### A. Kriteria-kriteria jalan arteri sekunder terdiri atas :

1. Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km/h
2. Lebar badan jalan paling rendah 11 (sebelas) meter
3. Akses langsung dibatasi tidak boleh lebih pendek dari 250 meter
4. Persimpangan pada jalan arteri sekunder diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya
5. Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata
6. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu jalan dan lain-lain
7. Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling besar dari sistem sekunder yang lain

8. Dianjurkan tersedianya jalur khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya
9. Jarak selang dengan kelas jalan yang sejenis lebih besar dari jarak selang dengan kelas jalan yang lebih rendah.

b) Ciri-ciri jalan arteri sekunder terdiri atas :

1. Jalan arteri sekunder menghubungkan :
2. Kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu;
3. Antar kawasan sekunder kesatu;
4. Kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua;
5. Jalan arteri/kolektor primer dengan kawasan sekunder kesatu;
6. Lalu lintas cepat pada jalan arteri sekunder tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat;
7. Kendaraan angkutan barang ringan dan bus untuk pelayanan kota dapat diijinkan melalui jalan ini
8. Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diijinkan pada jam sibuk

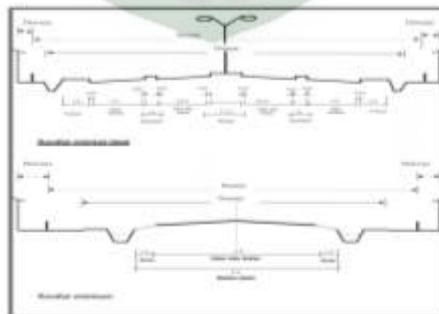


Gambar 2.5 Tipikal Penampang Melintang Jalan Arteri Sekunder  
*Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2006*

## 5. Jalan Kolektor Sekunder

Untuk penentuan klasifikasi fungsi jalan kolektor sekunder harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. Kriteria-kriteria jalan kolektor sekunder terdiri atas :
1. Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/h
  2. Lebar badan jalan kolektor sekunder paling rendah 9 (sembilan) meter
  3. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup
  4. Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari sistem primer dan arteri sekunder.
- B. Ciri-ciri jalan kolektor sekunder terdiri atas
1. Jalan kolektor sekunder menghubungkan
    - a. Antar kawasan sekunder kedua
    - b. Kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga
  2. Kendaraan angkutan barang berat tidak diijinkan melalui fungsi jalan ini di daerah pemukiman
  3. Lokasi parkir pada badan jalan dibatasi



Gambar 2.6 Tipikal Penampang Melintang Jalan Kolektor Sekunder  
*Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2006*

## 6. Jalan Lokal Sekunder

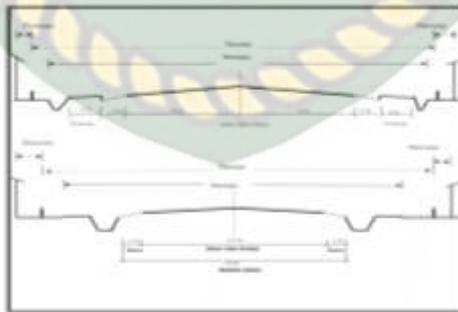
Untuk penentuan klasifikasi fungsi jalan lokal sekunder harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

### A. Kriteria-kriteria jalan lokal sekunder terdiri atas :

1. Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) km/h
2. Lebar badan jalan lokal sekunder paling rendah 6,5 (enam setengah) meter
3. Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah dibandingkan dengan fungsi jalan lain.

### B. Ciri-ciri jalan lokal sekunder terdiri atas :

1. Jalan lokal sekunder menghubungkan
2. Antar kawasan sekunder ketiga atau di bawahnya
3. Kawasan sekunder dengan perumahan
4. Kendaraan angkutan barang berat dan bus tidak diijinkan melalui fungsi jalan ini di daerah pemukiman.



Gambar 2.7 Tipikal Penampang Melintang Jalan lokal Sekunder

*Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2006*

### 2.4.3 Prasarana Drainase

Jaringan drainase merupakan prasarana yang berfungsi untuk mengalirkan air buangan. Air buangan tersebut berasal dari permukaan jalan, halaman rumah, serta air limbah rumah tangga. Melalui jaringan drainase, air dialirkan ke badan penerima air atau ke tempat resapan buatan. Jaringan drainase terdiri dari dua bagian utama, yaitu badan penerima air dan bangunan pelengkap.

Sistem drainase yang baik selalu memiliki bagian yang berfungsi menerima air. Bagian yang berfungsi untuk penerima air disebut sebagai badan penerima air. Contoh badan penerima air adalah sungai, danau dan laut. Badan penerima air dapat berupa sumber air dipermukaan tanah maupun sumber air di bawah permukaan tanah.

Sistem drainase juga harus memiliki bangunan pelengkap, fungsi dari bangunan pelengkap adalah untuk menghubungkan antara permukaan tanah dan sumber air buangan dengan badan penerima air. Contoh bangunan pelengkap pada jaringan drainase adalah gorong-gorong, pertemuan saluran bangunan terjunan, jembatan, *street intel*, pompa, dan pintu air.

### 2.4.4 Prasarana Air Minum

Jaringan air minum sangat diperlukan bagi lingkungan permukiman dan perumahan. Prinsip dasarnya setiap rumah harus mendapatkan layanan air minum untuk keperluan rumah tangga. Air minum harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan aman untuk dikonsumsi manusia. Jaringan air bersih berupa pipa yang tertanam didalam tanah. Pipa untuk mengalirkan air bersih dibuat dari bahan PVC atau GIP.

Jaringan air minum diperkotaan di Indonesia pada umumnya dilayani oleh perusahaan air minum (PAM). Untuk menghitung banyaknya air yang dipergunakan setiap bulan, dipergunakan alat berupa meteran air yang dipasang di setiap rumah pelanggan. Selain didistribusikan ke rumah-rumah, air bersih juga disediakan untuk memenuhi kebutuhan kepentingan umum. Pada kawasan perkotaan terdapat empat unsur yang harus terpenuhi dalam pengadaan air bersih yaitu sebagai berikut:

1. Air bersih dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan air.
2. Tersedianya jaringan atau saluran air bersih setiap rumah
3. Tersedianya kran umum
4. Tersedianya hidran kebakaran

Berdasarkan standar yang berlaku (SNI 03-1733-2004) , setiap satu kran umum disediakan untuk pemakai sebanyak 250 jiwa, dengan kapasitas minimum 30 liter/orang/hari. Selain untuk rumah tinggal dan kran umum, jaringan air bersih disediakan untuk mendukung sistem pencegahan kebakaran yang berupa penyediaan hidran kebakaran.

#### **2.4.5 Prasarana Air Limbah**

Limbah cair adalah limbah yang berbentuk cair dan berasal dari air buangan atau air bekas. Di lingkungan permukiman dan perumahan umumnya limbah cair berasal dari air buangan kamar mandi dan dapur. Limbah cair juga dapat berasal dari air hujan yang tidak tertampung oleh daya resap tanah. Idealnya limbah cair yang berasal dari air buangan dan air hujan dikembalikan ke dalam

tanah melalui sumur resapan. Dalam menempatkan sumur resapan perlu diperhatikan agar limbah yang ditampung tidak dicemari sumber air bersih. Selain limbah cair terdapat limbah padat yang berasal dari kakus. Limbah tidak boleh dibuang dan dialirkan ke dalam saluran drainase dan riol kota. Limbah padat harus dibuang ke dalam tempat penampungan yang disebut *septi tank*. *Septi tank* dibuat dibawah permukaan tanah dan ditempatkan di halaman rumah. Apabila lahan sangat terbatas maka dapat dibuat *septi tank* yang dipergunakan bersama-sama. Memperhatikan sifat-sifat air limbah dan tata cara pembuangannya yang berbeda-beda, terdapat tiga jenis elemen penting pada jaringan limbah air limbah, yaitu: *septi tank*, sumur resapan dan jaringan pemipaan air limbah.

#### **2.4.6 Prasarana Jaringan Persampahan**

Jenis limbah lain yang berasal dari rumah tangga adalah sampah. Di kawasan permukiman dan perumahan, sampah merupakan barang-barang buangan bekas pakai dari rumah tangga. Apabila tidak ditangani dengan baik tumpukan sampah akan menggunung dan mengotori lingkungan. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem pembuangan sampah yang terkoordinasi dan terkontrol. Sampah organik adalah sampah yang dapat diurai secara alamiah oleh bakteri dan tanah sehingga kembali menjadi tanah. Contoh sampah organik adalah daun-daun dan buah-buahan yang berguguran, sisa-sisa makanan dan sebagainya. Sampah non organik adalah sampah hasil industri yang tidak dapat diurai oleh bakteri dan tanah. Contoh sampah non organik adalah kaca atau gelas, keramik, plastik dan sebagainya.

Proses pembuangan dan pengolahan sampah dilakukan secara bertahap, pertama-tama sampah buangan rumah tangga ditampung dalam tempat sampah yang terdapat di setiap rumah. Selanjutnya sampah diangkut dengan gerobak sampah atau dengan mobil ketempat-tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang terdapat ditingkat Rw, kelurahan, hingga kecamatan. Sampah-sampah yang terkumpul di tempat oembuangan smapah sementara selanjutnya dipindahkan ke tempat pembungan air (TPA) untuk di daur ulang atau dihancurkan.

## **2.5 Kondisi dan Tingkat Kekumuhan**

Identifikasi satuan permukiman merupakan tahap identifikasi untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman swadaya dari setiap lokasi. Penentuan satuan permukiman untuk permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif, dimana penentuan satuan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun tetangga. Identifikasi kondisi kekumuhan merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Berikut penilaian lokasi berdasarkan aspek permasalahan kekumuhan terdiri atas klasifikasi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016):

- a. Tingkat Permukiman Kumuh Tinggi, merupakan tingkatan dimana indikator permukiman kumuh terpenuhi pada rentan 76% - 100%

- b. Tingkat Permukiman Kumuh Sedang, merupakan tingkatan dimana indikator permukiman kumuh terpenuhi pada rentan 51% - 75%
- c. Tingkat Permukiman Kumuh Ringan, merupakan tingkatan dimana indikator permukiman kumuh terpenuhi pada rentan 26% - 50%
- d. Tingkat Permukiman Bukan Kumuh, merupakan tingkatan dimana indikator permukiman kumuh terpenuhi pada rentan 0% - 25%

### 2.5.1 Kriteria Kawasan Kumuh

Identifikasi permasalahan kekumuhan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan permasalahan kekumuhan pada obyek kajian yang difokuskan pada aspek kualitas fisik bangunan dan infrastruktur keciptakaryaan pada suatu lokasi. Identifikasi permasalahan kekumuhan dilakukan berdasarkan pertimbangan pengertian perumahan kumuh dan permukiman kumuh, persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku, serta standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan secara nasional berdasarkan beberapa kriteria yang sesuai dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016) yaitu;

#### 1. Kondisi bangunan dengan faktor kriteria sebagai berikut:

- 1) Ketidakaturan bangunan

Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada permukiman tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.

2) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi

Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR.

KDB yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR. KLB yaitu angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.

3) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis meliputi: pengendalian dampak lingkungan; pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum; keselamatan bangunan gedung; kesehatan bangunan gedung; kenyamanan bangunan gedung; dan kemudahan bangunan gedung.

**2. Kondisi jalan lingkungan dengan faktor kriteria sebagai berikut:**

1) Jalan lingkungan tidak melayani permukiman

Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.

2) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk

Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

**3. Kondisi drainase lingkungan dengan faktor kriteria sebagai berikut:**

1) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan yang merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan.

2) Ketidakterediaan drainase

Ketidakterediaan drainase merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.

3) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan

Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

4) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya

Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa: pemeliharaan rutin atau pemeliharaan berkala.

5) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

**4. Kondisi penyediaan air minum dengan faktor kriteria sebagai berikut:**

1) Ketidakterediaan akses aman air minum

Ketidakterediaan akses aman air minum merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.

2) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku

Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

**5. Kondisi pengelolaan air limbah dengan faktor kriteria sebagai berikut:**

1) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku

Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

- 2) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana: kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik atau tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

#### **6. Kondisi pengelolaan persampahan dengan faktor kriteria sebagai berikut:**

- 1) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:

- a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga.
- b. Tempat pengumpulan sampah (tps) atau tps 3r (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan.
- c. Gerobak sampah atau truk sampah pada skala lingkungan.

- d. Tempat pengolahan sampah terpadu (tpst) pada skala lingkungan.
- 2) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis  
Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis yang dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: pewadahan dan pemilahan domestik; pengumpulan lingkungan; pengangkutan lingkungan; pengolahan lingkungan.
- 3) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan  
Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa: pemeliharaan rutin atau pemeliharaan berkala.

**7. Kondisi pengamanan kebakaran dengan faktor kriteria sebagai berikut:**

- 1) Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran  
Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi: pasokan air dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran)
- 2) Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran  
Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi

kebakaran yang meliputi: Alat Pemadam Api Ringan (APAR) seperti mobil pompa; mobil tangga sesuai kebutuhan; dan peralatan pendukung lainnya.

### **2.5.2 Identifikasi Legalitas Lahan**

Identifikasi legalitas lahan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan. Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan terdiri atas klasifikasi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016) yaitu status lahan legal dan status lahan tidak legal. Identifikasi legalitas lahan meliputi aspek:

#### **1. Kejelasan status penguasaan lahan**

Kejelasan status penguasaan lahan merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:

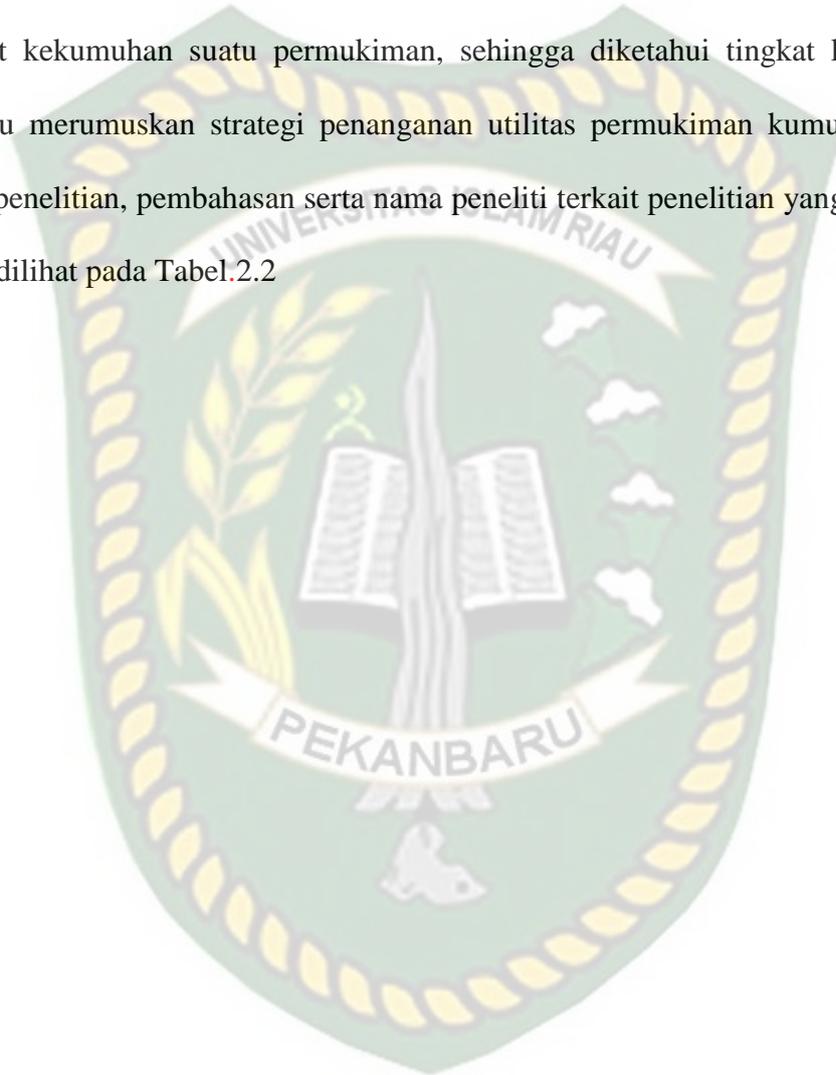
- a. Kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah atau
- b. Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.

#### **2. Kesesuaian dengan rencana tata ruang**

Kesesuaian dengan rencana tata ruang merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan utilitas pengembangan permukiman kumuh telah dilakukan oleh beberapa peneliti di masing-masing daerah yang berbeda. Penelitian tersebut menggunakan analisis skoring dengan pembahasan mengetahui tingkat kekumuhan suatu permukiman, sehingga diketahui tingkat kekumuhan mampu merumuskan strategi penanganan utilitas permukiman kumuh. Adapun judul penelitian, pembahasan serta nama peneliti terkait penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel.2.2



**Tabel 2.2 Penelitian Terkait Dengan Penelitian yang Dilakukan**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Jekson Koterisa, 2018	Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Bantaran Sungai Ampera Kelurahan Kaibus Kabupaten Sorong Selatan	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif melalui pembobotan atau scoring berdasarkan variabel dan indikator permukiman kumuh berdasarkan panduan penyusunan RP <sub>2</sub> KPKP.	Bahwa tingkat kekumuhan di kawasan bantaran sungai ampera adalah kumuh ringan. Hal ini terlihat dari kondisi fisik permukiman dimana terdapat bangunan yang tidak permanent atau tidak layak huni di beberapa titik pada II lingkungan, ketersediaan MCK umum dengan kondisi kurang baik dan tidak memenuhi syarat , serta jaringan drainase yang buruk tidak terlayani dan juga sarana prasarana proteksi kebakaran tidak ada, serta tidak terlayani ruang terbuka hijau di kelurahan tersebut.	Jurnal
2	Andi Dwi Fatmawati, 2017	Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol.	Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode pembobotan scoring dalam melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh dengan menggunakan tujuh indikator kekumuhan dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016 yaitu kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, penyediaan air limbah, kondisi pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran.	Bahwa kondisi kawasan permukiman di lokasi ini.ketidakteraturan bangunan pada kawasan permukiman kelurahan buol yang tidak beraturan dan rendahnya kualitas lingkungan kawasan tersebut, karena bangunan di kawasan tersebut dapat dilihat dari dari bangunan yang tidak layak huni dan tidak sesuai dengan ketentuan tata bangunan dalam RDTR yang meliputi pengaturan bentuk, besaran perletakan dan tampilan bangunan pada suatu kawasan.	Jurnal
3	Diana Margaretha Asa, 2015	Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan	1. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode survey primer dan metode survey sekunder.	Kelurahan panggungrejo Terdiri Atas dua tingkat kekumuhan yakni kekumuhan rendah dan kekumuhan sedang.variabel yang menjadi faktor	Skripsi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
		Panggungrejo Kota Pasuruan	2. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisa deskriptif dan analisa pembobotan.	penggerak dalam mengatasi permukiman kumuh adalah tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, pendapatan dan tingkat kemiskinan. Diperlukan upaya penanganan dalam mengatasi permukiman kumuh di kelurahan Panggungrejo yang melibatkan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.	
4	Novriadi, 2014	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Melalui Konsep Peremajaan ( Studi Kasus: Kelurahan Meranti Pandak)	Metode yang digunakan yaitu menggunakan teknik <i>Probability Sampling</i> (pengambilan sampling berdasarkan peluang) dengan cara <i>Random Sampling</i> (acak sederhana). Semua anggota masyarakat akan mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Hal ini dapat dilakukan karena populasi masyarakat pada kelurahan meranti pandak relatif homogen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permukiman kumuh dalam wilayah Kelurahan Meranti Pandak merupakan permukiman yang tidak tertata dengan baik. Peruntukan lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru pada lokasi peruntukan yang bukan kawasan permukiman.</li> <li>2. Bahwa kondisi prasarana permukiman pada Kelurahan Meranti Pandak masih belum memadai.</li> <li>3. Tingkat kekumuhan di Kelurahan Meranti Pandak tergolong dalam kategori kumuh sedang.</li> </ol>	Skripsi
5	Afrinal, 2018	Alternatif Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru	Penelitian ini memusatkan pada sudut pandang prasarana dan lingkungan, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik <i>Probability Sampling</i> (pengambilan sampling berdasarkan peluang) dengan cara <i>Random Sampling</i> (acak sederhana). Semua anggota masyarakat akan mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Hal ini dapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak, kondisi sosial ekonomi masyarakat berada pada tingkat yang rendah (prasejahtera), mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki pekerjaan tidak tetap, dan tingkat pendidikan tertinggi adalah SMA.</li> <li>2. Tingkat kekumuhan di Kelurahan Meranti Pandak termasuk dalam kriteria kumuh sedang.</li> <li>3. Rumusan konsep peremajaan permukiman kumuh pada kelurahan meranti pandak yakni</li> </ol>	Skripsi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
			dilakukan karena populasi masyarakat pada kelurahan meranti pandak relatif homogen.	rehabilitasi, <i>resettlement</i> dan konservasi.	
6	Suci Wiarni, Windy Mononimbar dan Suryadi Supardjo, 2018	Analisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman di Kecamatan Kotamobagu Timur	Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kuantitatif deskriptif melalui pembobotan atau skoring berdasarkan variable dan indikator permukiman kumuh berdasarkan panduan penyusunan RP <sub>2</sub> KPKP.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bahwa sebagian besar lokasi penelitian memiliki tata letak bangunan dengan kategori rendah.</li> <li>2. Mayoritas bangunan hunian pada lokasi permukiman berkonstruksi permanen yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki tempat tinggal yang kualitas huniannya baik, tetapi masih ada rumah yang tidak permanen karena memiliki pendapatan yang rendah.</li> <li>3. Bahwa jalan lingkungan sebagian besar dengan kondisi baik dan aspal.</li> <li>4. Sumber air minum yang didapat yaitu berasal dari PDAM.</li> <li>5. Bahwa kualitas kontruksi drainase sebagian besar dengan kualitas baik.</li> <li>6. Pengelolaan air limbah memiliki tilet atau mck di tiap bangunan</li> <li>7. Tidak memiliki proteksi kebakaran</li> <li>8. Tingkat kekumuhan dengan kategori kumuh ringan</li> </ol>	Jurnal
7.	Alexandra Aguiar Pedroa Alfredo Pereira Queiroz, 2019	Basemap perbandingan kota dan sensus	Sensus dan peta dasar kota dan orthophotos di-overlay dalam sistem informasi geografis untuk mengevaluasi persamaan dan perbedaan mereka, alasan ketidakkonsistenan di antara mereka.	<p>Tinggi 28 edsas dari ibge (41%) disajikan batas yang mirip dengan pmsp favelas: Sebuah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Parsial 12 edsas (18%) menyatakan batas-batas yang sebagian mirip dengan favelas (dengan area kosong atau fasilitas publik yang tidak digunakan untuk perumahan di dalam edsa.</li> <li>b. Rendah 25 edsas (37%) menyajikan kesamaan batas yang buruk dengan favelas</li> </ol>	Jurnal

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
				c. Absen 3 edsas tidak dianggap favelas oleh pmsp (4%)	

*Sumber:*

*Hasil*

*Analisis,2019*



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata “*Methodos*” yang terdiri kata “*Metha*” yaitu melewati menempuh atau melalui dan kata “*Hodos*” yang berarti cara atau jalan. Metode artinya cara atau jalan yang akan dilalui atau ditempuh. Sedangkan menurut istilah metode ialah cara berpikir tentang suatu masalah serta pemecahannya. Metodologi secara berasal bahasa Yunani yaitu “*Methodos*” dan “*Logos*” berarti ilmu atau bersifat ilmiah. Jadi metode penelitian merupakan prosedur kerja untuk mencari kebenaran (Moehadjir, 2000) dalam Sutanto (2016). Jhonston (1986) dalam Sutanto (2016) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan aturan dan prosedur untuk melakukan penelitian. Metode penelitian bersifat universal bagi semua ilmu pengetahuan. Pada umumnya dimulai dari masalah kemudian dilanjutkan dengan alternatif pemecahan masalah, perolehan data, analisis data, pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan.

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deduktif. Penelitian ini digolongkan dalam pendekatan deduktif karena peneliti mengkaji permasalahan yang umum berdasarkan pengujian suatu teori yang terdiri dari variabel-variabel, untuk menentukan apakah pengaruh antar variabel-variabel untuk menganalisis

tingkat kekumuhan pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran. Metode campuran adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif (Cresswel, 2013). Metode kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat tingkat kekumuhan dari permukiman kumuh tersebut. Sementara metode kualitatif berguna untuk mendukung metode kuantitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan data-data hasil kegiatan observasi, kuesioner, dan wawancara di lapangan.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kawasan permukiman Sukaramai dengan luas wilayah 6,60 Ha , jumlah penduduk 1.648 jiwa. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2019 sampai Januari 2020.

### **3.3 Jenis Data dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Penelitian ini akan menggunakan berbagai jenis data yang dibagi menjadi 2 jenis yaitu Kualitatif dan Kuantitatif.

##### **a) Data Kualitatif**

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau pun huruf dan bukan dalam bentuk angka, tahapan analisa data kualitatif ini diperoleh melalui

berbagai macam teknik pengumpulan data dari wawancara, analisis dokumen, observasi lapangan dan lain-lain. Analisis ini tidak dilakukan dengan menggunakan rumusan angka melainkan analisis dokumen dan kualitas.

b) Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang berasal dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh yang digunakan untuk mengukur dan menilai tingkat kekumuhan, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan untuk melihat pertumbuhan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, perekonomian penduduk dan berapa jumlah prasarana dan sarana.

### 3.3.2 Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan berbagai sumber data yang dibagi menjadi 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner berdasarkan data dari jumlah masyarakat miskin serta melakukan wawancara dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung

keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini (Sugiyono, 2017).

Pengumpulan data sekunder ditujukan untuk melengkapi data primer dan mendukung kebutuhan analisis. Data sekunder diperoleh dari Dinas Badan Pusat Statistik (BPS).

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

#### 1. Observasi Lapangan

Proses observasi wilayah studi dilakukan sebelum melakukan survey kuesioner. Hal ini dilakukan untuk melihat kondisi permukiman melalui 7 indikator permukiman kumuh yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Proses observasi dilengkapi dengan alat bantu berupa perekam visual seperti *camera digital*, *tape recorder*, dan buku catatan yang dapat mendokumentasikan seluruh data yang dibutuhkan.

#### 2. Kuesioner.

Kusioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang dipergunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang tanggapan masyarakat (*Stakeholders*) terkait dengan penanganan utilitas terhadap permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota.

### 3. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit atau kecil (Sugiyono ,2017).

### 3.5 Bahan dan Alat Penelitian

Adapun bahan dan alat yang digunakan pada proses pengambilan data untuk penelitian ini yaitu:

1. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan kondisi lapangan penelitian.
2. Alat tulis, digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dan berhubungan dengan penelitian.
3. Petunjuk waktu (arloji/ kalender), digunakan untuk menunjukkan waktu dan tanggal melakukan penelitian dan mengambil data.
4. Komputer, digunakan untuk mengolah data.

### 3.6 Teknik Pupulasi

#### 3.6.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2017). Berdasarkan hal tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah permukiman di Kelurahan

Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota dengan jumlah total bangunan hunian 358 unit.

### 3.6.2 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2017) Teknik Sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Simple Random Sampling. Teknik simple random sampling adalah pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Menurut Kerlinger (2006), simple random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. Teknik simple random sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner secara acak berdasarkan jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru kota.

### 3.6.3 Teknik Analisis

Dalam melakukan analisis ini menggunakan beberapa metode analisis seperti metode analisis deskriptif statistik, metode deskriptif kualitatif, metode analisis deskriptif kuantitatif dan metode analisis tersebut perlu dibantu dengan menggunakan alat analisis *scoring* atau pembobotan untuk menentukan kriteria tingkat kekumuhan.

Tingkat kekumuhan diukur dengan melihat bentuk hunian dan prasarana permukiman. Untuk mengukur kekumuhan dari bentuk hunian ini dilihat dari

kelayakan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan dari luas bangunan, material bangunan yang digunakan, ada atau tidaknya sistem jaringan sanitasi rumah tinggal, sedangkan mengukur kekekumuhan dari ketersediaannya prasana permukiman dengan sistem jaringan jalan, drainase, air bersih, persampahan dan air limbah.

Analisis *scoring* atau pembobotan digunakan untuk mencari bobot tertinggi dan terendah dalam menyusun tingkat kekumuhan di permukiman Kecamatan Pekanbaru Kota dan penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan dilakukan berdasarkan hasil kuesioner dan observasi yang diolah menjadi data sehingga dihasilkan informasi untuk mendukung data dalam analisis kualitatif.

### **3.7 Tahap Pembuatan Laporan Penelitian**

Dalam penelitian diperlukan tahap-tahap penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian serta dapat melakukan penelitian sesuai dengan tahapan-tahapannya. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

#### **3.7.1 Tahap Pembuatan Rancangan Penelitian**

Tahap pertama yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan lokasi penelitian
2. Menentukan masalah penelitian
3. Menentukan tujuan penelitian
4. Menentukan judul penelitian

5. Penyusunan kerangka pemikiran merupakan kerangka berpikir yang bersifat teoretis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti.

### **3.7.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sistematis dan teliti, dengan tujuan mendapatkan pengetahuan baru atau mendapatkan susunan dan tafsiran yang baru dari pengetahuan yang telah ada, dimana sikap orang yang bertindak itu harus kritis dan prosedur yang digunakan harus lengkap (Wirartha, 2005). Adapun tahapan pelaksanaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meminta surat izin penelitian dari fakultas
2. Mengurus perizinan untuk keperluan penelitian dan survei data berupa izin riset dari BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Provinsi Riau, dan diteruskan ke Kesbangpol Kota Pekanbaru untuk kemudian surat diperbanyak dan disebar ke instansi dan dinas terkait .
3. Menentukan kebutuhan data sekunder dan literatur-literatur yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian seperti Kecamatan Pekanbaru kota dalam angka, peta dan lainnya.
4. Menentukan data primer yakni melihat kebutuhan apa saja yang dilakukan dalam observasi lapangan, kuesioner atau wawancara.

### 3.7.3 Tahap Kompilasi Data

Kompilasi data merupakan suatu tahap untuk mengumpulkan data-data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Data-data ini kemudian akan digunakan sebagai bahan dan input dalam melakukan analisis pada penelitian ini. Data-data tersebut akan ditampilkan dalam bentuk:

1. Tabulasi, yaitu dengan menampilkan data yang diperoleh dengan tabel-tabel yang memuat susunan data penelitian berdasarkan berdasarkan klasifikasi yang sistematis sehingga lebih mudah dianalisis.
2. Diagramatik, yaitu menampilkan data-data yang diperoleh dalam bentuk grafik atau diagram.
3. Peta, untuk menampilkan batas administrasi, kondisi penggunaan lahan, serta prasarana di lokasi penelitian.
4. Dokumentasi, merupakan salah satu hasil observasi langsung ke lokasi penelitian berupa foto selama kegiatan penelitian.

### 3.7.4 Tahap Analisis Data

Adapun tahap-tahap analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi penduduk di Kelurahan Sukaramai**

Pada tahap analisa mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi penduduk di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif , dimana penelitian ini didapat dari hasil data sekunder yang ada yaitu data dari Instansi Badan Pusat Statistik (BPS) , kemudian dijelaskan guna untuk menggambarkan kondisi sosial, ekonomi dan

kependudukan. Dalam analisis ini data/informasi disajikan dalam bentuk tabel dan grafik

## **2. Mengidentifikasi Kondisi Prasarana Kelurahan Sukaramai**

Pada tahap analisa mengidentifikasi kondisi Prasarana Kelurahan Sukaramai , metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif kuantitatif, dimana penelitian ini didapat dari hasil observasi lapangan dan data sekunder yang ada. Kemudian dijelaskan guna menggambarkan kondisi serta apa apa saja utilitas yang ada dan menggambarkan kondisi fisik bangunan tempat tinggal di kawasan penelitian. Dalam analisis ini data/informasi disajikan dalam bentuk tabulasi, sehingga akan didapat penjelasan mengenai kondisi utilitas di Kecamatan Pekanbaru Kota.

Kondisi utilitas dan fisik bangunan tempat tinggal dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 02/PRT/M/2016 dan SNI 03-1773-2004 Tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan perkotaan.

## **3. Menganalisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Sukaramai**

Pada tahap menganalisis tingkat kekumuhan kawasan kumuh Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota ini, metode yang digunakan yaitu metode Skoring atau Pembobotan dengan Analisis Kuantitatif Dan Kualitatif. Tingkat kekumuhan membutuhkan informasi-informasi dari penyebaran kuesioner kepada para responden-responden yang menetap dan penduduk yang menetap pada objek penelitian ini yaitu permukiman kumuh Sukaramai.

Penilaian kekumuhan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh . Penilaian ini menggunakan tujuh kriteria yaitu: (1) kriteria bangunan gedung; (2) jalan lingkungan; (3) penyediaan air bersih dan minum; (4) drainase lingkungan; (5) pengelolaan air limbah; (6) pengelolaan persampahan; dan (7) pengaman kebakaran. Penilaian terhadap masing-masing indikator berdasarkan kondisi di lapangan, kemudian disesuaikan dengan parameter untuk di berikan nilai.

Masing-masing parameter mempunyai bobot nilai sebagai berikut:

- a. Bobot 5 (76% - 100% )
- b. Bobot 3 (51% -75% )
- c. Bobot 1 (25 % - 50 % )
- d. Bobot 0 ( 0-24%)

Setelah melaukukan penilain numerik dan presentase pada setiap kriteria sesuai rumus pada tabel diatas, maka selanjutnya dilakukan penilaian skor/pembobotan untuk kriteria kekumuhan. Adapaun nilai/skor pembobotan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan
  - a. Kumuh berat 71-95
  - b. Kumuh sedang 45-70
  - c. Kumuh ringan 19-44.
  - d. Bukan kumuh 0-18
2. Berdasarkan pertimbangan lain

- a. Pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15
  - b. Pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10
  - c. Pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5
3. Berdasarkan legalitas
    - a. Status tanah legal bila memiliki nilai positif (+)
    - b. Status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal

8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

- a. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2
- b. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2
- c. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2
- d. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4
- e. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4
- f. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4
- g. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6
- h. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6
- i. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.



**Tabel 3.1 Rumus Perhitungan Tingkat Kekumuhan**

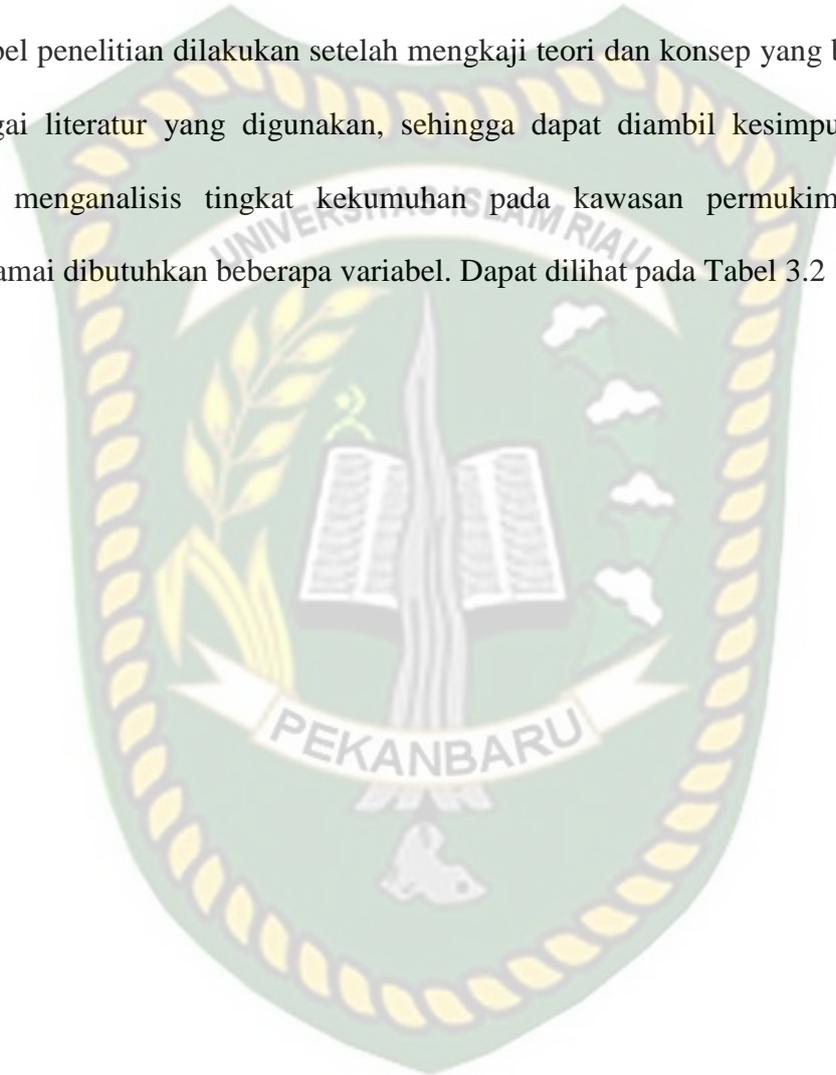
No	Aspek	Kriteria	Nilai Numerik	Satuan	Perhitungan Presentasi (%)
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan	Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	Unit	$\frac{\text{bangunan tidak teratur}}{\text{bangunan keseluruhan}} \times 100\%$
		Kepadatan bangunan	Lua kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	Ha	$\frac{\text{jumlah bangunan keseluruhan (unit)}}{\text{luas kawasan kumuh (Ha)}} \times 100\%$
		Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Unit	$\frac{\text{jumlah bangunan tidak sesuai persyaratan teknis (unit)}}{\text{jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	Panjang jalan ideal(m) – panjang jalan eksisting(m)	M	$\frac{\text{panjang jalan ideal(m)} - \text{panjang jalan eksisting(m)}}{\text{panjang jalan ideal (m)}} \times 100\%$
		Kualitas permukaan jalan lingkungan	Panjang jalan rusak	M	$\frac{\text{panjang jalan rusak (M)}}{\text{panjang jalan ideal (M)}} \times 100\%$
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum	KK tidak terakses air minum aman	KK	$\frac{\text{KK tidak terakses air minum aman}}{\text{KK keseluruhan}} \times 100\%$
		Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	KK tidak terakses air minum cukup	KK	$\frac{\text{KK tidak terakses air minum aman}}{\text{KK keseluruhan}} \times 100\%$
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	Luas kawasan yang terkena genangan	Ha	$\frac{\text{luas kawasan yang terkena genangan (Ha)}}{\text{luas kawasan keseluruhan (ha)}} \times 100\%$
		Ketidakterediaan drainase	Panjang drainase ideal(m) – panjang drainase eksisting (m)	M	$\frac{\text{panjang drainase ideal(m)} - \text{panjang drainase eksisting(m)}}{\text{panjang drainase ideal (m)}} \times 100\%$
		Ketidakterhubungan dengan sistem drainase kota	Panjang drainase akses ke sistem kota	M	$\frac{\text{panjang drainase penghubung (M)}}{\text{panjang drainase ideal (M)}} \times 100\%$
		Tidak terpeliharanya drainase	Panjang drainase tidak terpelihara	M	$\frac{\text{panjang drainase tidak terpelihara (M)}}{\text{panjang drainase total (M)}} \times 100\%$
		Kualitas konstruksi drainase	Panjang drainase rusak	M	$\frac{\text{panjang drainase buruk (M)}}{\text{panjang drainase total (M)}} \times 100\%$

No	Aspek	Kriteria	Nilai Numerik	Satuan	Perhitungan Presentasi (%)
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	Jumlah KK dengan sistem air limbah tidak ssesuai standar teknis	KK	$\frac{\text{jumlah KK dgn sistem air limbah tdk sesuai standar teknis}}{\text{jumlah KK keseluruhan}} \times 100\%$
		sarana prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah KK dengan prasarana dan sarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	KK	$\frac{\text{jumlah KK dgn sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis}}{\text{jumlah KK keseluruhan}} \times 100$
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sarana prasarana persapahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah KK dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah tidak sesuai persyaratan teknis	KK	$\frac{\text{jumlah KK dgn sarpras pengolaan sampah yg tdk sesuai standar teknis}}{\text{jumlah KK keseluruhan}} \times 100$
		Sistem Pengolahan persampahan yang tida sesuai standar teknis	Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	KK	$\frac{\text{jumlah KK dgn pengolaan sampah tdk sesuai standar teknis}}{\text{jumlah KK keseluruhan}} \times 100$
		Tidak terpeliharanya sarana prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah KK dgn sarana dan prasarana pengelolaan sampah tidak terpelihara	KK	$\frac{\text{jumlah KK dgn sarpras pengelolaan sampah tdk terplihra}}{\text{jumlah KK keseluruhan}} \times 100$
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Unit	$\frac{\text{jumlah bangunan tdk terlayani sarana proteksi kbkran}}{\text{jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100$
		Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	Unit	$\frac{\text{jumlah bangunan tdk terlayani prasarana proteksi kbkran}}{\text{jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100$

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.2 Tahun 2016

### 3.8 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat maupun nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Variabel penelitian dilakukan setelah mengkaji teori dan konsep yang berasal dari berbagai literatur yang digunakan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menganalisis tingkat kekumuhan pada kawasan permukiman kumuh Sukaramai dibutuhkan beberapa variabel. Dapat dilihat pada Tabel 3.2



**Tabel 3.2 Variabel Penelitian**

No	Tujuan	Variabel	Indikator	Metode
1	Mengidentifikasi Karakteristik Sosial Ekonomi penduduk di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota.	a. Sosial b. Ekonomi	a. Tingkat pendidikan b. Tingkat umur c. kondisi rumah d. Jumlah anggota keluarga e. Jenis pekerjaan f. Tingkat penghasilan	Analisis Deskriptif Kualitatif-Kuantitatif
2.	Mengidentifikasi Kondisi Utilitas dan Fisik Bangunan Tempat Tinggal di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota.	a. Prasarana b. Fisik bangunan	a. Jaringan Jalan b. Jaringan Air minum c. Drainase d. Jaringan Persampahan e. Air limbah / Sanitasi f. Proteksi kebakaran g. Kondisi bangunan - Permanen - Semi permanen - Non permanen h. Status kepemilikan bangunan i. Luas bangunan	Analisis Deskriptif Kualitatif-Kuantitatif
3.	Menganalisis Tingkat Kekumuhan yang Ada di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota.	Tingkat Kekumuhan	a. Kriteria kawasan kumuh	Metode Skoring/Pembobotan dengan analisis Kuantitatif dan Kualitatif

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Tabel 3.3 Desain Survei

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Sumber Data	Metode Pengambilan Data	Ceklis Data
1.		Mengidentifikasi Karakteristik Sosial Ekonomi penduduk di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota.	a. Tingkat pendidikan b. Tingkat umur c. Kondisi rumah d. Jumlah anggota keluarga e. Jenis pekerjaan f. Tingkat penghasilan	1. Data Sekunder: a. BPS Kota Pekanbaru b. Kantor Camat Pekanbaru Kota).	Survei Sekunder	√
2	Menganalisis tingkat kekumuhan yang ada di Kelurahan Sukaramai	Mengidentifikasi Kondisi Utilitas dan Fisik Bangunan Tempat Tinggal di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota.	a. Jaringan Jalan b. Jaringan Air Bersih c. Drainase d. Jaringan Persampahan e. Air limbah / Sanitasi f. Pengaman kebakaran/ hidran kebakaran g. Kondisi bangunan - Permanen - Semi permanen - Tidak permanen h. Status kepemilikan bangunan i. Luas bangunan	1. Data Primer: a. Kuesioner b. Wawancara c. Observasi 2. Data Sekunder: a. Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru	Survei Primer : a. Menyebar Kuesioner Kepada Masyarakat b. Mewawancarai Langsung Kepada Masyarakat Atau Dinas Yang Terkait c. Observasi Langsung Ke lapangan Untuk Melihat Kondisi Yang Sebenarnya dengan menggunakan alat kamera, atau catatan.	√

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Sumber Data	Metode Pengambilan Data	Ceklis Data
3	Kecamatan Pekanbaru Kota	Menganalisis Tingkat Kekumuhan yang Ada di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota.	a. Kriteria kawasan kumuh	1. Data Primer: a. Observasi lapangan b. Kuesioner 2. Data Sekunder: a. Dinas KOTAKU Kota Pekanbaru	Survei Primer, observasi langsung ke lapangan untuk melihat kondisi permukiman kumuh dengan menggunakan alat kamera dan catatan sebagai pedoman.	√

Sumber : Hasil Analisis, 2019



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM WILAYAH

#### 4.1 Kondisi Umum Kota Pekanbaru

##### 4.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru

Berdasarkan letak geografisnya wilayah Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ}14'00''$ -  $101^{\circ}34'00''$  BT dan  $0^{\circ}25'00''$ -  $0^{\circ}45'00''$  LU. Secara fisik luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km<sup>2</sup>. Adapun batasan geografis dari wilayah perencanaan ini adalah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau setelah dikeluarkannya Perda Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 mengalami pemekaran wilayah kecamatan yang sebelumnya hanya terdiri dari 8 kecamatan menjadi 12 kecamatan dan 58 kelurahan. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya aktivitas di kegiatan penduduk di Kota Pekanbaru yang menuntut tersedianya fasilitas dan utilitas perkotaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Tahun 2019**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Tampan	59,81
2	Payung Sekaki	43,24
3	Bukit Raya	22,05
4	Marpoyan Damai	29,74
5	Tenayan Raya	171,27
6	Lima Puluh	4,04
7	Sail	3,26
8	Pekanbaru Kota	2,26
9	Sukajadi	3,76
10	Senapelan	6,65
11	Rumbai	128,85
12	Rumbai Pesisir	157,33
Jumlah		632,26

*Sumber : BPS Kota Pekanbaru, 2019*

#### 4.1.2 Kondisi Fisik Dasar

##### 4.1.2.1 Topografi

Kota Pekanbaru memiliki permukaan yang relatif datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir. Pada pinggiran kota umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampian. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

#### **4.1.2.2 Klimatologi**

Pada umumnya Kota Pekanbaru beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berada pada bulan April dan suhu minimum pada bulan Agustus 2018. Sementara jumlah hari hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember.

#### **4.1.3 Kependudukan**

Pada akhir tahun 2017, tercatat bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru sebanyak 1.091.088 Jiwa kemudian mengalami peningkatan jumlah penduduk pada akhir tahun 2018 dengan menjadi 1.117.359 jiwa. Penduduk laki-laki di Kota Pekanbaru lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin 105, artinya terdapat 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Tampan	307.947
2	Payung Sekaki	91.255
3	Bukit Raya	105.177
4	Marpoyan Damai	131.550
5	Tenayan Raya	167.929
6	Lima Puluh	41.466
7	Sail	21.492
8	Pekanbaru Kota	25.103
9	Sukajadi	47.420
10	Senapelan	36.581
11	Rumbai	67.654
12	Rumbai Pesisir	73.784
	Jumlah	1.117.359

*Sumber : BPS Kota Pekanbaru, 2019*

#### 4.1.4 Perekonomian

Sebagai salah satu indikator ekonomi makro, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan produktivitas perekonomian suatu daerah pada tahun tertentu. Pada tahun 2017 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru berdasarkan harga berlaku mencapai 101.111.788,5 juta rupiah dan meningkat pesat di tahun 2018 menjadi 108.839.930,0 juta rupiah. Sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan pada tahun 2018 meningkat sebesar 68.104.347,7 juta rupiah dibandingkan tahun sebelumnya 64.620.230,4 juta rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2015-2018**

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1.341.806,1	1.509.890,7	1.622.018,9	1.734.205,1
2	Pertambangan dan penggalian	16.235,7	18.995,7	20.710,2	21.317,0
3	Industri Pengolahan	16.703.456,4	18.417.242,8	20.113.842,5	21.366.334,7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	148.090,9	183.141,7	205.159,6	212.257,6
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.351,5	14.293,5	15.539,8	15.618,6
6	Konstruksi	24.763.478,0	27.187.120,6	29.989.751,1	32.882.122,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	24.520.354,9	27.348.384,0	30.811.637,6	33.091.743,6
8	Transportasi dan Pergudangan	2.105.082,8	2.355.054,6	2.532.446,8	2.716.150,8
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.819.509,0	1.941.720,1	2.207.895,8	2.146.482,5
10	Informasi dan Komunikasi	1.818.250,1	1.953.261,8	2.102.420,6	2.275.459,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.971.439,2	3.294.182,5	3.290.518,2	3.587.416,9
12	Real Estate	2.404.177,9	2.580.851,7	2.675.157,8	2.773.170,2
13	Jasa Perusahaan	15.366,3	16.756,4	18.919,0	21.035,1
14	Administrasi Pemerintahan	2.751.629,5	2.817.609,2	2.932.022,9	3.010.105,4
15	Jasa Pendidikan	956.881,0	1.029.180,8	1.112.505,7	1.117.987,2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	408.609,8	447.501,3	487.084,5	539.517,2

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018
17	Jasa Lainnya	904.612,7	1.034.143,5	1.154.175,5	1.275.069,0
<b>PDRB</b>		83.663.984,1	92.129.330,9	101.111.788,5	108.839.983,0

*Sumber : BPS Kota Pekanbaru, 2018*

**Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2015-2018**

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	900.151,8	935.605,4	974.364,2	1.106.779,3
2	Pertambangan dan penggalan	10.275,8	10.525,2	10.784,1	10.741,9
3	Industri Pengolahan	12.582.984,8	13.449.057,4	14.448.916,3	14.924.580,6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	117.361,2	131.296,5	131.682,2	133.500,9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.774,0	11.630,7	11.734,8	11.744,3
6	Konstruksi	15.977.717,5	16.968.684,9	18.226.661,4	19.398.468,5
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	16.114.678,3	17.061.111,6	18.157.414,1	19.431.654,3
8	Transportasi dan Pergudangan	1.481.825,8	1.529.901,2	1.599.772,3	1.651.775,3
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.005.034,4	1.047.019,7	1.084.729,4	2.024.762,3
10	Informasi dan Komunikasi	1.694.228,4	2.354.009,6	2.298.523,6	2.419.502,1

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.187.502,7	2.354.009,6	2.298.523,6	2.419.502,1
12	Real Estate	1.711.993,9	1.744.089,4	1.784.843,2	2.419.502,1
13	Jasa Perusahaan	11.129,6	11.508,8	12.513,6	13.779,2
14	Administrasi Pemerintahan	2.301.539,4	2.269.218,7	2.281.129,5	2.298.755,3
15	Jasa Pendidikan	609.550,4	612.294,8	617.700,6	645.649,7
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	276.054,3	287.009,6	617.700,6	645.649,7
17	Jasa Lainnya	621.289,2	678.007,2	735.367,0	806.970,5
	<b>PDRB</b>	57.616.752,7	60.891.070,2	64.620.230,4	68.104.347,7

*Sumber : BPS Kota Pekanbaru, 2018*

#### 4.1.5 Kesesuaian Lahan

Luas lahan terbangun (built-up areas) sekitar 24% dari luas wilayah kota dan dimanfaatkan sebagai kawasan perumahan (sekitar 73% dari luas areal terbangun), pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri, militer, bandara, dan lain- lain. Areal belum terbangun (non-built up areas) adalah sekitar 76% dari luas wilayah kota saat ini yang merupakan kawasan lindung, perkebunan, semak belukar, dan hutan. Areal ini sebagian besar terdapat di wilayah utara kota (Rumbai dan Rumbai Pesisir), Tenayan Raya dan sekitarnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5 Jenis Penggunaan Lahan Di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
<b>A. Lahan Terbangun (built up areas)</b>		
1	Kawasan Perumahan	10,914.44
2	Kawasan Pemerintahan	100.23
3	Kawasan Pendidikan	282.30
4	Kawasan Perdagangan	666.07
5	Kawasan Industri	1,794.94
6	Militer	134.93
7	Bandara	276.00
8	Lain-lain	723.07
<b>Jumlah</b>		<b>14,891.98</b>
<b>B. Lahan Tidak Terbangun (non-built up areas)</b>		
1	Kawasan Lindung	2,605.75
2	Kawasan Perkebunan	18,372.33
3	Kawasan Semak Belukar	24,733.49
4	Hutan	2,622.45
<b>Jumlah</b>		<b>48,334.02</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>63,226.00</b>

Sumber: Draf RTRW Kota Pekanbaru

## 4.2 Kondisi Umum Kecamatan Pekanbaru Kota

### 4.2.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota

Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru yang terletak di antara  $0^{\circ}51'$  -  $0^{\circ}53'$  Lintang Utara dan  $120^{\circ}44'$  -  $101^{\circ}45'$  Bujur Timur.

Sedangkan batas-batas wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Lima Puluh
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi
- c. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Senapelan
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sail

### 4.2.2 Kependudukan

#### 4.2.2.1 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan

Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota mencapai 25.103 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduknya mencapai 11.108 jiwa/km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6.

**Tabel 4.6 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2019**

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Simpang Empat	1.603	2.429
2	Sumahilang	5.431	10.649
3	Tanah Datar	6.481	22.348
4	Kota Baru	3.082	12.842
5	Sukaramai	5.112	20.448
6	Kota Tinggi	3.394	10.948
	<b>Jumlah</b>	<b>25.103</b>	<b>11.108</b>

Sumber: BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019

Dari Tabel 4.6 dapat dilihat jumlah penduduk paling tinggi berada di Kelurahan Tanah Datar sebanyak 6.481 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 22.348 jiwa/km<sup>2</sup>. Dan kelurahan paling rendah terdapat di Kelurahan Simpang Empat dengan jumlah penduduk 1.603 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk 2.2429 jiwa/km<sup>2</sup>.

#### 4.2.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Pekanbaru Kota

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Pekanbaru Kota, laki-laki yakni sebanyak 12.712 jiwa dan perempuan sebanyak 12.391 jiwa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2019**

No	Kelurahan	Jumlah Laki-laki (jiwa)	Jumlah Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Simpang Empat	674	929	1.603

2	Sumahilang	2.942	2.489	5.431
3	Tanah Datar	3.115	3.366	6.481
4	Kota Baru	1.597	1.485	3.082
5	Sukaramai	2.647	2.465	5.112
6	Kota Tinggi	1.738	1.656	3.394
	<b>Jumlah</b>	<b>12.712</b>	<b>12.391</b>	<b>25.103</b>

Sumber: BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki paling tinggi berada di Kelurahan Tanah Datar sebanyak 3.115 jiwa dan jenis kelamin perempuan paling tinggi berada di Kelurahan Tanah Datar sebanyak 3.366 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki terendah berada di Kelurahan Simpang Empat yaitu 674 jiwa dan jenis kelamin perempuan terendah berada di Kelurahan Simpang Empat yaitu 929 jiwa.

#### 4.3 Letak Geografis dan Luas Wilayah Kelurahan Sukaramai

Kelurahan Sukaramai terletak di Kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas wilayah Kelurahan adalah 2,5 Km<sup>2</sup>, jarak lurus dari Kelurahan Sukaramai menuju Ibukota Kecamatan yaitu 1 KM di kawasan Kelurahan Kota Tinggi. Batas wilayah Kelurahan Sukaramai dapat dilihat pada peta dibawah ini :

- e) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sago
- f) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanah Datar
- g) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Tinggi
- h) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru

Titik koordinat dengan *Latitude Kelurahan Sukaramai adalah 0.31.52.61 dan Longitude Kelurahan Sukaramai adalah 101.26.42.90*, Kelurahan ini terletak di dataran yang memiliki luas wilayah 21,8 Ha, dengan ketinggian

1.386 meter di atas permukaan laut dan beriklim tropis. Perkembangan ekonomi di kelurahan ini ditopang oleh Perdagangan (pasar).

#### 4.3.1 Kondisi Demografi

Kelurahan Sukaramai terdiri dari 7 RW, 21 RT dan 847 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.8.

**Tabel 4.8 Jumlah Luas Wilayah, Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Jumlah KK di Kelurahan Sukaramai Tahun 2019**

No	Rukun Warga (RW)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Rukun Warga(RT)	Jumlah KK
1	RW 01	2,5 Km <sup>2</sup>	3	100
2	RW 02		4	195
3	RW 03		3	101
4	RW 04		2	22
5	RW 05		3	110
6	RW 06		3	116
7	RW 07		3	203
<b>Jumlah</b>		2,5 Km <sup>2</sup>	21	847

*Sumber: Kantor Lurah Kelurahan Sukaramai, 2019*

Dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa Jumlah Rukun Warga(RW) dan Jumlah KK terbanyak yang berada di Kelurahan Sukaramai yaitu di RW 07.

#### 4.3.2 Kependudukan

##### 4.3.2.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Sukaramai mencapai 5.144 jiwa pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.9.

**Tabel 4.9 Jumlah Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kepadatan Penduduk di Kelurahan Sukaramai Tahun 2019**

No	Rukun Warga (RW)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk(Jiwa)	Kepadatan Penduduk
1	RW 01	2,5 Km <sup>2</sup>	663	76.2069
2	RW 02		945	335.3571
3	RW 03		985	428.2609
4	RW 04		224	746.6667
5	RW 05		709	312.3348
6	RW 06		626	206.6007
7	RW 07		993	184.8148
<b>Jumlah</b>		2,5 Km <sup>2</sup>	5145	2290.242

*Sumber: Kantor Lurah Kelurahan Sukaramai, 2019*

Dari Tabel 4.9 bahwa Jumlah Penduduk di Kelurahan Sukaramai tahun 2019 yang Terpadat berada di RW 07 dan kepadatan penduduk paling sedikit berada di RW 01.

#### 4.3.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan

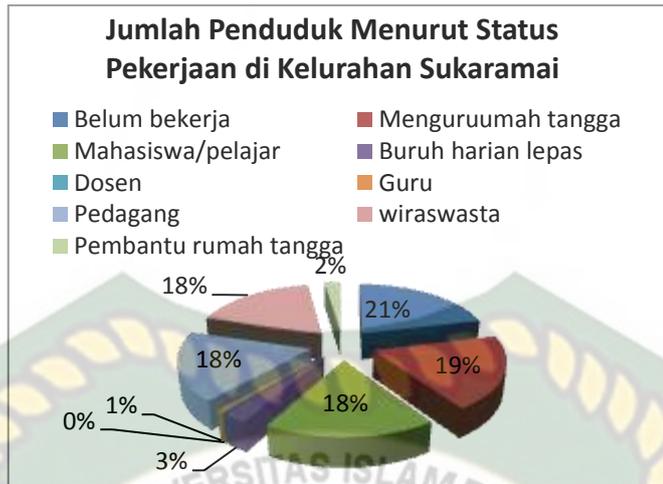
Jumlah penduduk menurut status pekerjaan di Kelurahan Sukaramai tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.10

**Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan di Kelurahan**

#### **Sukaramai Tahun 2019**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum bekerja	873
2	Mahasiswa / pelajar	725
3	Buruh harian lepas	102
4	Dosen	8
5	Guru	24
6	Pedagang	742
7	Wiraswasta	742
8	Pembantu rumah tangga	97
9	Juru masak	31
10	Karyawan BUMN	120

*Sumber: Kantor Lurah Kelurahan Sukaramai, 2019*



**Gambar 4.1 Grafik Jumlah Menurut Status Pekerjaan di Kelurahan Sukaramai**

*Sumber: Hasil Analisis, 2019*

Dari Tabel 4.10 dan Grafik 4.1 bahwa jumlah penduduk menurut status pekerjaan di Kelurahan Sukaramai adalah mayoritas pedagang dan wiraswasta yaitu sebanyak 742 jiwa.

#### 4.3.2.3 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

Jumlah penduduk menurut Pemeluk Agama di Kelurahan Sukaramai, agama islam 4.843 jiwa, khatolik 81 jiwa, protestan 72 jiwa, dan budha 149 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.11.

**Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama di Kelurahan Sukaramai Tahun 2019**

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk Menurut Agama			
		Islam	Khatolik	Protestan	Budha
1	RW 01	592	18	152	38
2	RW 02	845	30	35	35
3	RW 03	966	4	3	12
4	RW 04	200	3	2	19
5	RW 05	679	8	5	17
6	RW 06	604	7	2	13
7	RW 07	957	11	10	15
Jumlah		4.843	81	72	149

Sumber: Kantor Lurah Kelurahan Sukaramai, 2019

Dari Tabel 4.11 bahwa mayoritas jumlah penduduk menurut pemeluk agama di Kelurahan Sukaramai adalah agama islam sebanyak 4.843 jiwa. Dan untuk pemeluk agama khatolik 81 jiwa, protestan 72 jiwa dan budha 149 jiwa.

#### 4.3.2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk menurut **kelompok umur** di Kelurahan Sukaramai adalah 2604 jiwa untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan 2541 jiwa untuk jenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.12.

#### 4.12 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kelurahan Sukaramai Tahun 2019

No	Golongan Umur ( Tahun)	Jumlah penduduk	
		Jenis Kelamin (Jiwa)	
		Laki –laki	Perempuan
1	0-04	291	275
2	05-09	284	288
3	10-14	247	264
4	15-19	180	192
5	20-24	213	197
6	25-29	171	150
7	30-34	175	163
8	35-39	158	162
9	40-44	152	148
10	45-49	165	168
11	50-54	171	148
12	55-59	150	184
13	60-64	160	120
14	65-69	40	34
15	70-44	28	27
16	75 ke atas	19	21
Jumlah		2604	2541

Sumber: Kantor Lurah Kelurahan Sukaramai, 2019

Dari Tabel 4.12 bahwa jumlah penduduk menurut kelompok umur yang ada di Kelurahan Sukaramai mayoritas adalah penduduk yang berumur 0-4 tahun sebanyak 291 jiwa dan jumlah penduduk paling rendah berada di umur 75 tahun ketas sebanyak 19 jiwa.

### **4.3.3 Kondisi ekonomi, sosial dan budaya**

#### **4.3.3.1 Kondisi Ekonomi**

Kelurahan Sukaramai merupakan salah satupusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru yang banyak di kunjungi oleh para wisatawan untuk berbelanja. Kelurahan Sukaramai Lebih dikenal dengan Pasar Pusat Ramayana, selain pusat perbelanjaan juga terdapat Hotel yang beraa di Kelurahan Sukaramai. Masyarakat yang berada di kelurahan Sukaramai Rata-Rata perkejaan nya adalah berdagang, Sukaramai juga merupakan salah satu pusat produksi kerupuk jengkol.

Dalam hal ini dapat membantu meningkatkan perekonomian di kelurahan sukaramai melalui perdagangan. Dilihat dari pekerjaan masyarakat di sukaramai dari 847 Kepala Rumah Tangga, 742 KK merupakan pedagang, jadi 96% Kepala Rumah Tangga yang ada memiliki pekerjaan sebagai pedagang.

#### **4.3.3.2 Kondisi Sosial dan Budaya**

Masyarakat yang berada di kelurahan Sukaramai mayoritas penduduk nya berasal dari suku Minang.

### **4.4 Fasilitas dan Prasarana**

#### **4.4.4.1 Fasilitas**

## 1. Fasilitas Peribadatan

Di Kecamatan Pekanbaru Kota fasilitas peribadatan yang ada berjumlah 20 masjid, 25 musholla, 3 gereja dan 1 vihara dan mayoritas penduduknya yaitu menganut agama islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.13.

**Tabel 4.13 Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2019**

No	Kelurahan	Jumlah tempat ibadah				Jumlah
		Masjid	Musholla	Gereja	vihara	
1	Simpang Empat	3	5	1	-	9
2	Sumahilang	6	2	1	-	9
3	Tanah Datar	3	2	-	-	5
4	Kota Baru	4	6	-	1	11
5	Sukaramai	2	5	-	-	7
6	Kota Tinggi	2	5	1	-	7
<b>Jumlah</b>		20	25	3	1	48

*Sumber: BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019*



**Gambar 4.2 Kondisi Sarana Peribadatan di Kelurahan Sukaramai**

*Sumber: Hasil Survey 2019*

## 2. Fasilitas Pendidikan

Di Kecamatan Pekanbaru Kota fasilitas pendidikan yang ada berjumlah 7 TK, 3 SD Negeri, 5 SD Swasta dan 3 SMP Swasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.14.

**Tabel 4.14 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2019**

No	Kelurahan	Tingkat Pendidikan				
		TK	SD Negeri	SD Swasta	SMP Swasta	SMA Swasta
1	Simpang Empat	2	-	1	1	-
2	Sumahilang	1	1	2	1	1
3	Tanah Datar	-	2	1	-	-
4	Kota Baru	2	-	2	-	-
5	Sukaramai	1	-	1	1	-
6	Kota Tinggi	1	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Sumber: BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019



**Gambar 4.3 Kondisi Sarana Pendidikan di Kelurahan Sukaramai**  
 Sumber: Hasil Survey, 2019

### 3. Fasilitas Kesehatan

Di Kecamatan Pekanbaru Kota fasilitas kesehatan yang ada berjumlah 3 rumah sakit, 3 rumah sakit bersalin, 1 puskesmas/pustu, 5 poliklinik/balai pengobatan, dan 13 praktek dokter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.15.

**Tabel 4.15 Jumlah Kesehatan Menurut Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2019**

No	Kelurahan	Jumlah Fasilitas Kesehatan					Jumlah
		Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas/Pustu	Poliklinik	Praktek Dokter	
1	Simpang Empat	1	1	-	-	3	5
2	Sumahilang	1	1	-	-	-	2
3	Tanah Datar	1	1	-	1	7	10
4	Kota Baru	-	-	-	-	-	-
5	Sukaramai	-	-	1	1	-	2
6	Kota Tinggi	-	-	-	3	3	6
<b>Jumlah</b>		3	3	1	5	13	25

Sumber: BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019



**Gambar 4.4 Kondisi Sarana Kesehatan di Kelurahan Sukaramai**

Sumber: Hasil Survey, 2019

#### 4. Fasilitas Perumahan dan Permukiman

Fasilitas perumahan dan permukiman di kelurahan Sukaramai sudah memadai yang jumlah penghuni dalam satu rumah rata-rata terdiri dari 4 jiwa, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.16.

**Tabel 4.16 Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Jiwa Menurut Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2018**

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Rata-rata (ART) jiwa
1	Simpang Empat	1.603	596	2,70
2	Sumahilang	5.431	1.013	5,33
3	Tanah Datar	6.481	1.565	4,14
4	Kota Baru	3.082	952	3,21
5	Sukaramai	5.112	892	5,72
6	Kota Tinggi	3.394	678	5,36
<b>Jumlah</b>		25.103	5.696	4,41

*Sumber: BPS Kecamatan Dalam Angka, 2018*

#### 4.4.1.2 Prasarana

##### 1. Jaringan Jalan

Kondisi jaringan jalan di Kelurahan Sukaramai masih terdapatnya permukiman yang tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan, dan ada beberapa jaringan jalan dengan permukaan jalan yang masih berlobang dan jalan tanah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.17.

**Tabel 4.17 Panjang Jalan Menurut Kelurahan dan Jenis Permukaan di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2018.**

No	Kelurahan	Jenis permukaan jalan
		Jalan aspal
1	Simpang	27

No	Kelurahan	Jenis permukaan jalan
		Jalan aspal
	Empat	
2	Sumahilang	16
3	Tanah Datar	14
4	Kota Baru	14
5	Sukaramai	12
6	Kota Tinggi	12
<b>Jumlah</b>		95

Sumber: BPS Kecamatan Dalam Angka, 2018

## 2. Jaringan Air Bersih

Di Kelurahan Sukaramai penduduknya mayoritas bersumber air bersih dari sumur bor dan sumur artesis dan sebagian minoritas mendapatkan air bersih dari jaringan perpipaan (SPAM) melalui PDAM. Berikut kondisi sumber air bersih di Kelurahan Sukaramai dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Kondisi Air Minum  
Sumber : Hasil Survey, 2019

## 3. Jaringan Listrik

Jaringan listrik di Kelurahan Sukaramai sudah memadai, karena rata-rata penduduk sudah mendapatkan listrik dari sambungan PLN. Berikut Gambar 4.13 kondisi jaringan listrik dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 4.6 Kondisi Jaringan Listrik di Kelurahan Sukaramai**

*Sumber: Hasil Survey, 2019*

#### **4. Jaringan Drainase**

Jaringan drainase di Kelurahan Sukaramai cukup memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Sebagian besar lingkungan perumahan sudah dilengkapi dengan drainase permanent dan sebagian masih ada drainase galian. Sistem drainase di Kelurahan Sukaramai masih belum berfungsi dengan semestinya karena masih ada yang membuang sampah di aliran drainase yang menyebabkan drainase tersebut tersumbat dan tidak di aliri oleh air.

#### **5. Jaringan Sanitasi (Air Limbah)**

Kondisi sanitasi air limbah rumah tangga di Kelurahan Sukaramai untuk limbah padat disalurkan melalui septi tank pribadi, sedangkan untuk limbah cairnya dibuang langsung ke saluran drainase.

#### **6. Jaringan Persampahan**

Secara garis besar, pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui dua sistem, yaitu sistem tradisional dengan cara menimbun atau membakar dan

yang kedua adalah dengan sistem pengelolaan melalui lembaga yang ada, yang biasanya dikelola oleh Pemerintah Kota. Di Kelurahan Sukaramai belum terdapat tempat pembuangan sampah (TPS) dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) melainkan hanya menumpukkan sampah di depan perkarangan rumah.

## 7. Jaringan Komunikasi

Di Kecamatan Pekanbaru Kota fasilitas komunikasi yang ada berjumlah 1 kantor pos, dan 2 stasiun pemancar radio. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.18.

**Tabel 4.18 Jumlah Fasilitas Komunikasi Menurut Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2018**

No	Kelurahan	Jumlah Sarana Komunikasi	
		Kantor Pos	Stasiun Pemancar Radio
1	Simpang Empat	-	1
2	Sumahilang	-	-
3	Tanah Datar	-	1
4	Kota Baru	1	-
5	Sukaramai	-	-
6	Kota Tinggi	-	-
<b>Jumlah</b>		1	2

*Sumber: BPS Kecamatan Dalam Angka, 2018*

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru bahwasannya Kecamatan Pekanbaru Kota ini merupakan lokasi ditetapkannya sebagai permukiman kumuh dengan 4 ( empat ) kelurahan yaitu di Kelurahan Tanah Datar, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Sukaramai dan Kelurahan Sumahilang. Secara spesifik Kelurahan Sukaramai memiliki 7 RW dan 21 RT. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi dan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 kawasan permukiman kumuh Sukaramai yaitu seluas 6,60 Ha dengan koordinat  $101^{\circ}26'41,525''E$  dan  $0^{\circ}31'28,610''N$ , dengan jumlah penduduk 1.648 jiwa, jumlah bangunan rumah 358 unit, jumlah rumah tangga 369 KK dan status legalitas tanah kawasan kumuh Sukaramai ini yaitu tanah milik masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1 Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Sukaramai**

Kawasan	Koordinat		luas (Ha)	Jumlah Penduduk	Jumlah Bangunan Rumah	Jumlah Rumah Tangga	Legalitas Tanah
	Latitude (X)	Longitude (Y)					
Kawasan Kumuh Sukaramai	$101^{\circ}26'41,525''E$	$0^{\circ}31'28,610''N$	6,60 Ha	1.648 Jiwa	358 Unit	369 KK	Tanah Masyarakat

Sumber: Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 dan Hasil Analisis, 2019

PETAAA



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## **5.1 Identifikasi Karakteristik Sosial Ekonomi Penduduk di Kawasan Kumuh Sukaramai**

Pada umumnya karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang berada di permukiman kumuh berada di garis kemiskinan, hal ini dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam mendapatkan hidup yang lebih layak. Kehidupan yang lebih layak adalah terpenuhinya segala kebutuhan baik sandang, papan dan pangan, namun dalam kemampuan masyarakat yang biasa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut hanya masyarakat yang mampu dan mempunyai penghasilan yang cukup.

Berdasarkan hasil kuesioner dari 358 populasi, mayoritas alasan mereka tinggal di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sukaramai itu karena dekat dengan tempat pekerjaan, penghasilan rendah dan sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dimana seseorang atau sebuah keluarga yang berpendapatan rendah cenderung meletakkan prioritas utama pada lokasi rumah yang berdekatan dengan tempat yang memberikan kesempatan kerja. Tanpa kesempatan kerja, menopang kebutuhan sehari-hari sulit bagi mereka untuk dapat mempertahankan hidupnya. Status kepemilikan rumah dan lahan menempati prioritas kedua, sedangkan bentuk maupun kualitas rumah merupakan prioritas terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.2



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**Tabel 5.2 Tingkat Sosial, Ekonomi dan Kependudukan Kawasan Permukiman Kumuh Sukaramai**

Tingkat Pendidikan	Persen %	Tingkat Penghasilan	Persen %	Anggota Keluarga	Persen %	Jenis Bangunan	Persen %	Jenis Pekerjaan	Persen %
Tamat SD	17,6 %	200.000-500.000/Bulan	29,4 %	2 orang	11,7 %	Permanen	47,0 %	Ibu rumah tangga	29,4 %
Tamat SMP	23,5 %	500.000-1.000.000/Bulan	47,0 %	3 orang	11,7 %	Semi permanen	35,2 %	Pedagang	52,9 %
Tamat SMA/ SMK	11,7 %	>1.500.000/Bulan	23,5 %	4 orang	29,4 %	Non permanen	17,6 %	Pegawai Swasta	11,7 %
Tamat S1	11,7 %	200.000-500.000/Bulan	29,4 %	> 4 orang	23,5 %			Ibu rumah tangga	29,4 %
<b>Jumlah</b>	100%	100%		100%		100%		100%	

*Sumber: Hasil Survey dan Hasil Analisis, 2019*

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat bahwa alasan penduduk untuk tetap bertempat tinggal di kawasan permukiman kumuh Sukaramai ini karena untuk tingkat penghasilan masyarakatnya rendah yaitu sekitar 500.000- 1.000.000/bulan, jumlah anggota keluarga yaitu 4 orang dalam 1 KK dan jenis pekerjaan yang didapat hanya sebagai pedagang yang hanya cukup untuk menyewa rumah dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga yang rendah dan untuk jenis bangunan rumah yaitu rata-rata permanen.

## 5.2 Identifikasi Kondisi Prasarana Tempat Tinggal Kawasan Kumuh Sukaramai

### 5.2.1 Kondisi Utilitas di Kawasan Kumuh Sukaramai

#### 5.2.1.1 Bangunan Gedung

Kondisi perumahan dan permukiman kumuh Sukaramai ini sangat rapat dengan bangunan yang permanen, semi permanen dan non permanen. Untuk bangunan permukiman dengan status non permanen yang kurang memenuhi persyaratan permukiman layak huni. Adapun persyaratan permukiman layak huni yaitu keteraturan letak bangunan penilaian dari segi pondasi bangunan, dinding, atap, dan kepadatan bangunan dengan luas  $\geq 200$  unit/hektar untuk kota kecil. Selain itu suatu bangunan harus memenuhi persyaratan teknis bangunan yang ditinjau dari kesesuaian lokasi, keamanan, kenyamanan, kesehatan, kemudahan. Semakin banyak rumah dalam suatu lingkungan permukiman yang tidak memenuhi persyaratan huni dapat menyebabkan tingkat keselamatan, kesehatan, dan keamanan penghuni perumahan / permukiman kurang terjamin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.1



**Gambar 5.1 Kondisi Bangunan Gedung**  
*Sumber : Hasil Survey, 2019*

**PETAA**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

### 5.2.1.2 Jalan Lingkungan

#### a) Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan

Cakupan pelayanan jalan lingkungan dapat dilihat dari dua indikator yaitu perlunya keterhubungan antar perumahan dalam lingkup permukiman skala wilayah dan perlunya keterhubungan antar jalan dalam perumahan dalam skala kawasan. Berdasarkan hasil survei dan observasi lapangan bahwasannya jalan lingkungan yang ada di Kawasan Kumuh Sukaramai terdapatnya permukiman yang tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.3



**Gambar 5.3 Kondisi Jalan Lingkungan**  
*Sumber : Hasil Survey, 2019*

#### b) Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan

Kualitas permukaan jalan lingkungan merupakan kondisi jenis perkerasan jalan lingkungan kawasan kumuh Sukaramai. Berdasarkan hasil observasi bahwasannya kualitas jalan lingkungan di Kawasan Kumuh Sukaramai ini berupa semenisasi dan ada beberapa jalan tanah. Akan tetapi terdapat jalan lingkungan yang kondisi permukaan jalan masih rusak dan berlobang dengan lebar jalan 1 m sampai dengan 1.5 m.

**PETAA**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

### 5.2.1.3 Penyediaan Air Minum

#### a) Ketidaktersediaan Akses Air Minum dan Air Bersih

Akses aman air minum ialah apabila tercapainya akses jaringan distribusi air minum kepada masyarakat dengan standar air minum sesuai syarat kesehatan air minum yang terdiri atas persyaratan fisik, persyaratan mikrobiologis, dan persyaratan kimiawi.

Berdasarkan hasil observasi di Kawasan Kumuh Sukaramai bahwasannya belum maksimalnya ketersediaan akses aman air minum kerana hanya minoritas masyarakat yang menggunakan sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan (SPAM) melalui PDAM, Sedangkan mayoritas masyarakat di lokasi masih menggunakan air bersumber dari sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (SPAM BJP) yaitu sumur bor dan sumur artesis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.4



**Gambar 5.4 Kondisi Air Minum**  
*Sumber : Hasil Survey, 2019*

PETAAAAA



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

#### 5.2.1.4 Drainase Lingkungan

##### a) Drainase Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air

Drainase lingkungan yang tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan akan menimbulkan genangan. Berdasarkan hasil observasi kawasan kumuh Sukaramai bahwasannya saluran drainase yang sudah terbangun tidak mampu mengalirkan limpasan air dikarenakan kondisinya banyak tersumbat oleh sampah yang menyebabkan penyempitan saluran, aliran air drainase tidak mengalir, dan sedimentasi saluran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.5



**Gambar 5.5 Kondisi Drainase**  
*Sumber : Hasil Survey, 2019*

##### b) Tidak Terpeliharanya Drainase

Pemeliharaan saluran drainase perkotaan mencakup bentuk pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dengan tujuan menjaga fungsi sistem saluran drainase yang ada. Untuk itu diperlukan pemeliharaan sistem drainase

diperkotaan yang dapat dikategorikan menjadi pemeliharaan rutin, berkala, khusus, dan rehabilitasi.

Berdasarkan hasil observasi di kawasan kumuh Sukaramai saluran drainase yang sudah terbangun saat ini masih terdapat saluran drainase yang tidak terawat dan banyaknya tumpukan sampah yang berdampak aliran air di drainase tidak mengalir, dikarenakan tidak terdapatnya program pemeliharaan saluran drainase baik itu pemeliharaan rutin, berkala, khusus dan rehabilitasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.6



**Gambar 5.6 Kondisi Drainase Lingkungan**  
*Sumber : Hasil Survey, 2019*

PETAAAAA



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

#### 5.2.1.5 Air Limbah

##### a) **Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis**

Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis apabila kondisi pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem air limbah yang memadai, ditinjau dari kloset yang terhubung dengan tangki septi tank baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

Berdasarkan hasil observasi di kawasan kumuh Sukaramai dimana rumah yang menggunakan kloset yang terhubung dengan septik tank yaitu hanya rumah dengan kondisi permanen. hal ini menyebabkan pengelolaan air limbah permukiman tidak sesuai standar teknis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.7



**Gambar 5.7 Kondisi Air Limbah**

*Sumber : Hasil Survey, 2019*

PETAAAAAA



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

### 5.2.1.6 Pengelolaan Persampahan

#### a) Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis apabila tidak terpenuhinya prasarana dan sarana sampah yang terdiri atas tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada skala lingkungan, gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan, dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi kawasan kumuh Sukaramai prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai persyaratan teknis karena tidak ditemukan tempat sampah hanya ada truk sampah pada skala lingkungan dan jam-jam tertentu saja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.8



**Gambar 5.8 Kondisi Persampahan**  
*Sumber : Hasil Survey, 2019*

**b) Tidak Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Pengolahan Persampahan**

Berdasarkan hasil observasi di kawasan kumuh Sukaramai bahwasannya tidak terpelihara sarana dan prasarana pengelolaan sampahnya sebanyak 369 KK karena tidak adanya bentuk pemeliharaan pengolahan persampahan baik secara rutin maupun berkala. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.9



**Gambar 5.9 Kondisi Persampahan**  
*Sumber : Hasil Survey, 2019*

PETAAAAA



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

### 5.2.1.7 Proteksi Kebakaran

#### a) Tidak Tersedianya Prasarana Proteksi Kebakaran

Berdasarkan hasil observasi kawasan kumuh Sukaramai tidak ditemukan prasarana proteksi kebakaran seperti bangunan pos kebakaran, pasokan air yang lebih, jalan lingkungan yang tidak bisa dilalui mobil kebakaran, dan tidak adanya data sistem proteksi kebakaran lingkungan.

#### b) Tidak Tersedianya Sarana Proteksi Kebakaran

Berdasarkan hasil observasi kawasan kumuh Sukaramai tidak ditemukan sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APAR), mobil pompa, mobil tangga sesuai kebutuhan, dan peralatan pendukung lainnya, sehingga dapat di simpulkan bahwasannya kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sukaramai ini tidak ada sarana dan prasarana kebakaran.

### 5.2.1.8 Legalitas Tanah

Kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa yang pertama kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah atau kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat) dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis. Hasil analisis dan survey bahwa Kawasan Sukaramai yaitu keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain( Tidak Legal).

### 5.2.1.9 Pertimbangan Lain

1. Nilai Strategis Lokasi
  - a. Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada lokasi kawasan permukiman kumuh Sukaramai terletak pada fungsi strategis kabupaten atau kota dengan nilai 5.
2. Kependudukan
  - a. Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman kumuh Sukaramai dengan klasifikasi untuk kota sedang dan kota kecil kepadatan penduduk pada lokasi sebesar > 200 jiwa/ha dengan nilai 3
  - b. C. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya
  - c. Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan dan permukiman kumuh Sukaramai berupa lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara dengan nilai 1.

### 5.3 Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh Sukaramai

Menganalisis tingkat kekumuhan permukiman kumuh Sukaramai berdasarkan Surat Keputusan (SK ) 878 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Sukaramai sebesar 6,60 Ha. Untuk analisis mengukur tingkat kekumuhan kawasan Kumuh Sukaramai lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.3

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| a. Kab/kota               | : Pekanbaru      |
| b. Provinsi               | : Riau           |
| c. Kecamatan              | : Pekanbaru Kota |
| d. Kelurahan              | : Sukaramai      |
| e. Luas Verifikasi        | : 6,60 Ha        |
| f. Jumlah Penduduk        | : 1.648 Jiwa     |
| g. Jumlah bangunan        | : 358 Unit       |
| h. Jumlah Kepala Keluarga | : 325 KK         |

**Tabel 5.3 Perhitungan Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh**

**Sukaramai**

Aspek	Kriteria	Kondisi Awal (Baseline)			
		Numerik	Satuan	Presen(%)	Nilai
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan	210,00	Unit	58,67%	3
	Kepadatan bangunan	6,60	Ha	18%	0
	Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	90,00	Unit	25,13%	1
<b>Rata-Rata Kondisi Bangunan Gedung</b>				<b>33,943</b>	<b>4</b>
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	200,00	Meter	10,68%	0
	Kualitas permukaan jalan lingkungan	1.565,00	Meter	50,99%	1
<b>Rata-Rata Kondisi Jalan Lingkungan</b>				<b>30,84%</b>	<b>1</b>
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum	141,00	KK	43,38%	1
	Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	138,00	KK	42,46%	1
<b>Rata-Rata Kondisi Penyediaan Air Minum</b>				<b>42,92%</b>	<b>2</b>
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	4,00	Ha	60,61%	3
	Ketidakterediaan drainase	1.167,00	Meter	26,93%	1
	Ketidakterhubungan dengan sistem drainase kota	0	Meter	0,00%	0
	Tidak terpeliharanya drainase	3.169,00	Meter	73,07%	3
	Kualitas konstruksi drainase	1.632,00	Meter	37,63%	1
<b>Rata-Rata Kondisi Drainase Lingkungan</b>				<b>39,65%</b>	<b>8</b>
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	129,00	KK	39,70%	1
	sarana prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	198,00	KK	60,92%	3
<b>Rata-Rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah</b>				<b>50,31%</b>	<b>4</b>
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sarana prasarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	369,00	KK	100%	5
	Sistem Pengolahan persampahan yang tida sesuai standar teknis	106,00	KK	32,61%	1
	Tidak terpeliharanya sarana prasarana pengelolaan persampahan	369,00	KK	100%	5
<b>Rata-Rata Kondisi Pengelolaan Persampahan</b>				<b>77,54%</b>	<b>11</b>
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran	358,00	Unit	100%	5
	Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran	358,00	Unit	100%	5
<b>Rata-Rata Kondisi Proteksi Kebakaran</b>				<b>100%</b>	<b>10</b>
<b>Total Nilai</b>					<b>40</b>
<b>Tingkat Kekumuhan</b>					<b>Kumuh Ringan</b>
Legalitas Tanah	Kejelasan status penguasaan tanah				(+)
	Kesesuaian RTR				(+)

Aspek	Kriteria	Kondisi Awal (Baseline)			
		Numerik	Satuan	Presen(%)	Nilai
<b>Total</b>					(+)
Pertimbangan Lain	Nilai Strategis lokasi				<b>5</b>
	Kependudukan				<b>3</b>
	Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya				<b>1</b>
<b>Total</b>					<b>9</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Keterangan:

1. Bobot Nilai tingkat kekumuhan
  - e. Bobot 5 (76% - 100% )
  - f. Bobot 3 (51% -75% )
  - g. Bobot 1 (25 % - 50 % )
  - h. Bobot 0 ( 0-24%)
2. Skor Nilai tingkat kekumuhan
  - e. Kumuh berat 71-95
  - f. Kumuh sedang 45-70
  - g. Kumuh ringan 19-44.
  - h. Bukan kumuh 0-18

Berdasarkan hasil tabel 5.3 bahwa dari 7 indikator tingkat kekumuhan tersebut maka didapatkan hasil analisis dengan perhitungan tingkat kekumuhan di kawasan permukiman Kumuh Sukaramai dengan skor nilai total yaitu 40 dikategorikan sebagai tingkat **Kumuh Ringan**, sedangkan dari aspek legalitas tanah yaitu **Positif (+)** dan aspek pertimbangan lain yaitu 9 dengan **Pertimbangan Lain Sedang**.

**Tabel 5.4 Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator, dan Parameter**

**Kawasan Kumuh Sukaramai**

No	Aspek	Kriteria	Parameter	Nilai	Kawasan Permukiman Kumuh Sukaramai
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	3
			51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
		Tingkat Kepadatan Bangunan	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	-
			51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
			25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	1
			51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
		2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3				
25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1				
Kualitas permukaan jalan lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk			5	1
	51% - 75% area memiliki			3	

No	Aspek	Kriteria	Parameter	Nilai	Kawasan Permukiman Kumuh Sukaramai		
			kualitas permukaan jalan yang buruk				
			25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1			
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman.	5	1		
			51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman.	3			
			25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman.	1			
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Minimal	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	1		
			51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3			
			25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1			
		4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, >2jam dan > 2x setahun	5	3
					51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, >2jam dan > 2x setahun	3	
					25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, >2jam dan > 2x setahun	1	
Ketidakterediaan Drainase	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan			5	1		
	51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan			3			
	25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan			1			
Ketidakhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya			5	-		
	51% - 75% drainase			3			

No	Aspek	Kriteria	Parameter	Nilai	Kawasan Permukiman Kumuh Sukaramai		
		Tidak terpeliharanya Drainase	lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	3		
			25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya				
			76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5			
			51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3			
			25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1			
		Kualitas Konstruksi Drainase	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	1		
			51% - 75% area kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3			
			25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1			
		5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	1
					51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	
25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1						
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarana prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis			5	3		
	51% - 75% area memiliki sarana prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis			3			
	25% - 50% area sarana			1			

No	Aspek	Kriteria	Parameter	Nilai	Kawasan Permukiman Kumuh Sukaramai
			prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis		
6	Kondisi Pengelolaan Sampah	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarana prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	5
			51% - 75% area memiliki sarana prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			25% - 50% area memiliki sarana prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
		Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	1
			51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
			25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	
		Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	76% - 100% area memiliki sarana prasarana persampahan yang tidak terpelihara	5	5
			51% - 75% area memiliki sarana prasarana persampahan yang tidak terpelihara	3	
			25% - 50% area memiliki sarana prasarana persampahan yang tidak terpelihara	1	
		7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3				
25% - 50% area tidak	1				

No	Aspek	Kriteria	Parameter	Nilai	Kawasan Permukiman Kumuh Sukaramai
			memiliki prasarana proteksi kebakaran		
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	5
			51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
			25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	
<b>Jumlah</b>					<b>40</b>
8	Pertimbangan Lain	Nilai Strategis Lokasi	lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	<b>5</b>	5
			lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	1	
		Kependudukan	Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar > 400 jiwa/ha	5	5
			Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar > 200 jiwa/ha (Kota Kecil)		
			Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 151-200 jiwa/ha	3	
			Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar <150 jiwa/ha	1	
		Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	1
			Lokasi tidak memiliki potensi sosial ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	1	
<b>Jumlah</b>					<b>11</b>
9	Legalitas Tanah	Kejelasan status penguasaan tanah	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain	<b>(+)</b>	<b>(+)</b>
			sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik	<b>(-)</b>	

No	Aspek	Kriteria	Parameter	Nilai	Kawasan Permukiman Kumuh Sukaramai
			milik sendiri atau milik pihak lain		
		Kesesuaian RTR	Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	(+)
			sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.2 Tahun 2016 dan Hasil Analisis,2020

**Tabel 5.5 Rekapitulasi Skoring dan Klasifikasi Penilaian Permukiman Kumuh Sukaramai**

No	Kawasan	Jumlah Penilaian Kriteria Dan Indikator Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan			Pertimbangan Lain			Legalitas Tanah		Klasifikasi	Skala Prioritas
			Kumuh Berat	Kumuh Sedang	Kumuh Ringan	Tinggi	Sedang	Rendah	Legal	Tidak Legal		
			(71-95)	(45-70)	(19-44)	(11-15)	(6-10)	(1-5)	(+)	(-)		
1	Kawasan Kumuh Sukaramai	40			X		X		X		C3	Prioritas 6

*Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.2 Tahun 2016 dan Hasil Analisis,2020*

Berdasarkan tabel 5.5 bahwa penilaian klasifikasi kawasan permukiman kumuh Sukaramai yaitu **C3** yang merupakan kondisi kekumuhan **Ringan**, dengan status tanah **Legal** dan pertimbangan lain **Sedang** maka dapat ditentukan skala prioritas penanganannya yaitu **Prioritas Ke 6 (enam)**.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, bahwa dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

- a. Permukiman kumuh dalam wilayah Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan permukiman yang tidak terencana dan tidak tertata dengan baik. Kawasan kumuh Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan permukiman yang terletak di kawasan pusat kota dan kawasan perdagangan dan jasa. Untuk tingkat penghasilan masyarakatnya rendah yaitu sekitar 500.000- 1.000.000/bulan, jumlah anggota keluarga yaitu 4 orang dalam 1 KK dan jenis pekerjaan yang didapat hanya sebagai pedagang yang hanya cukup untuk menyewa rumah dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga yang rendah dan untuk jenis bangunan rumah yaitu rata-rata permanent.
- b. Kondisi utilitas kawasan kumuh Sukaramai yang pertama yaitu untuk kondisi bangunan dengan kriteria ketidakteraturan bangunan adalah 51%-75% sedangkan untuk kriteria ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan yaitu 25%-50%. Yang kedua untuk kondisi jalan lingkungan dengan kriteria kualitas permukaan jalan lingkungan yaitu 25%-50%. Yang ketiga untuk kondisi penyediaan air minum dengan kriteria ketersediaan akses aman air minum yaitu 25%-50%, sedangkan kriteria tidak terpenuhi kebutuhan air minum yaitu 25%-50%. Yang keempat

untuk kondisi drainase lingkungan dengan kriteria ketidakmampuan mengalirkan limpasan air yaitu 51%-75%, kriteria ketersediaan drainase yaitu 25%-50%, kriteria tidakterpeliharanya yaitu 51%-75%, kriteria kualitas kontruksi drainase yaitu 25%-50%. Yang kelima untuk kondisi air limbah dengan kriteria sistem pengolahan air limbah tidak sesuai standar teknis yaitu 25%-50%, kriteria sarana prasarana pengolan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis yaitu 51%-75%. Yang keenam untuk kondisi persampahan dengan kriteria sarana prasarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis yaitu 76%-100%, kriteria sistem pengeloan persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis yaitu 25%-50%, dan kriteria tidak terpeliharanya sarana prasarana pengelolaan persampahan yaitu 76%-100%..

- c. Total nilai tingkat kekumuhan kawasan Sukaramai berada dengan nilai total 40 disebut sebagai Kumuh Ringan dengan klasifikasi C3 dan skala prioritas 6.

## **6.2 Saran**

- a. Memberikan bantuan fasilitas terhadap perekonomian masyarakat, seperti koperasi simpan pinjam atau diberikan pelatihan untuk membuat kerajinan tangan agar mayarakat di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota mendapatkan penghasilan tambahan.
- b. Perlu melakukan perbaikan prasarana untuk kawasan kumuh Sukaramai kota seperti penyedian prasarana dan sarana tempat persampahan untuk setiap lingkungan permukiman, memenuhi kebutuhan kecukupan untuk air

minum yang aman, meningkatkan kualitas drainase yang layak, menambah jumlah drainase dan pelebaran jalan lingkungan, memperbaiki rumah susun di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Astuti, Puji. 2004. *Studi Pola Pergerakan Mengonsumsi Fasilitas Sosial di Kawasan Pinggiran Kota Pekanbaru*. Tesis. Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Institut Teknologi Bandung. Bandung
- Bintarto, R. 1997. *Pengantar Geografi Kota*. Yogyakarta. U.P. Spring Bourne , Larry S. 1981. *The Geography of Housing*. London. V.H. Winston and Son Publiser
- Clinord, Marshal, B. 1978. *Slum and Community Development*. Toronto-Ontario: Collier- Macmillan Canada Ltd.
- Creswell, J.W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Finch, Verno C. 1957. *Elemens of geography*. New York : Mcgraw Hill Book Company.
- Hariyanto, Asep 1999. *Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Sehat Dalam Jurnal PWK Unisba*. . Bandung. Unisba
- Kerlinger. 2006. *Asas-Asas Penelitian Behavior*. Edisi 3, cetakan 7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kodoatie, Robert J. dan Hadimoeljono. 2005. *Kajian Undang- Undang Sumber Daya Air*. Yogyakarta : Andi

- Kodoatie, Robert J. dan Roestam, Sjarief. 2005. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta : Andi
- Khomarudin 1997:83-112. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman* :Jakarta. Yayasan Real Estate Indonesia, PT Rakasindo. Jakarta.
- Muta'ali, Lufhfi 2015. *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada
- Muta'ali, Lufhfi 2006. *Identifikasi Kawasan Kumuh Wilayah Tengah Kabupaten Kutai Kartanegara*. Laporan Penelitian. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggarong.
- Nugroho. A. R. 2010. *Studi Kawasan Kumuh Kota Banjarmasin*. . Laporan Penelitian. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarmasin.
- Prayitno, Budi 2014. *Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh* . Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada
- PT.Holistika Primagrahita. 2010. *Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan*. Kota Pekanbaru. Holistika Primagrahita. Pekanbaru
- Sastra M, Suparno dan Endy Marlina. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*.Yogyakarta : Andi
- Sugandhy, dkk. 2009. *Hand out Sistem Informasi Geografi (SIG), Fakultas Pendidikan Ilmu Pngetahuan Sosial Upi : Bandung*.

Surtiani, E, E. 2006, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota(Studi Kasus: Kawasan Pancuran, Saltiga)*, Tesis Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Semarang.

Surplan , Parsudi. 1984. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Soetrisno, 1998. *Proposal Harbinson Analisis Kebijakan Pertanian*.

Rindarjono. 2012. *“SLUM” Kajian Permukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial*. Yogyakarta : Media Perkasa.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&d*. Bandung: Alfabeta, Cv.

Soemirat, Juli, 2011 (Edisi Refisi). *Kesehatan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Yoduhusodo, Siswono, Et. Al. 1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta : Kantor Menpera

Yoduhusodo , Siswono, Et Al. 1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakrta : Yayasan Padamu Negeri.

Yunus, Hadi Sabari. 2000. *Dinamika Wilayah. Peri Urban Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta.

Yunus, Hadi Sabari. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta.

### **Peraturan Pemerintah**

Badan Pusat Statistik (BPS). *Kecamatan Pekanbaru Kota Dalam Angka Tahun 2018*. BPS: Kota Pekanbaru. 2018

- Dapartemen Pekerjaan Umum. 2007 *Tentang Penetapan Kawasan Kumuh*.
- Kamus Tata Ruang( 1997). *Dirtjen Cipta Karya Dapertement Pekerjaan Umum*.  
Jakarta
- Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia  
Nomor 2 Tahun 2016. *Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*
- Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia  
Nomor 38 Tahun 2015. *Tentang Bantuan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum*
- Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 1992. *Tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016. *Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Utilitas*.
- Undang – Undang No.26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*
- Undang – Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2011. *Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*
- Undang – Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1992. *Tentang Perumahan dan Permukiman*
- Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004. *Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan*. Jakarta. Badan Standarisasi Nasional

## Jurnal

- Afrianal. 2018. *Alternatif Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru*. Skripsi Teknik Lingkungan. Universitas Riau: Pekanbaru
- Asa, Margaretha, Diana. 2015. *Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan*. Skripsi Teknik Pwk. Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Merdeka Pasuruan: Pasuruani.
- Fatmawati, Dwi, Andi. 2017. *Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol*.
- Koterisa, Jekson. 2018. *Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Bantaran Sungai Ampere Kelurahan Kaibus Kabupaten Sorong Selatan*.
- Novrialdi. 2018. *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Melalui Konsep Peremajaan ( Studi Kasus: Kelurahan Meranti Pandak)*. Skripsi Teknik Pwk. Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau: Pekanbaru
- Nursyahbani, Raisya dan Pigawati, Bitta. 2015. *Kajian Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh Di Kampong Kota ( Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang)*. Jurnal Teknik Pwk. Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro: Semarang.

Supardjo, Suryadi, Mononimbar, Windy,Wiami, Suci. 2018. *Analisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman di Kecamatan Kotamobagu Timur*.  
Jurnal Teknik Pwk. Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota.

### Website

<https://docplayer.info/54155999-Strategi-penanganan-kawasan-permukiman-kumuh-di-nagari-painan-selatan-kecamatan-iv-jurai.html>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/20870>

[https://www.researchgate.net/publication/322502345 Analisis Karakteristik dan Penilaian Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kampung Braga - Kota Bandung](https://www.researchgate.net/publication/322502345_Analisis_Karakteristik_dan_Penilaian_Tingkat_Kekumuhan_Kawasan_Permukiman_Kampung_Braga_-_Kota_Bandung)

<https://www.slideshare.net/infosanitasi/panduan-identifikasi-kawasan-permukiman-kumuh>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/20851>.